BADAN PENGARAH PAPUA
BADAN PENGARAH PAPUA PROVINSI PAPUA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA LANTAI 4 JALAN AHMAD YANI NOMOR 8 GURABESI
KOTA JAYAPURA 99111; TELEPON (0967) 5164423
SUREL BADANPENGARAHPAPUA@GMAIL.COM; SITUS WWW.BADANPENGARAHPAPUA.GO.ID/

NOTA DINAS

NOMOR ND-28/BPP-P/JYP/2026

Yth.	:	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Dari	:	Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu Berkas
Hal	:	Penyampaian Laporan Bulanan Agustus 2026
Tanggal	:	4 September 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Anggota BPP dan Pokja BPP Provinsi Papua selama bulan Agustus 2026, bersama ini disampaikan laporan hasil kegiatan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) BPP/BP3OKP.

Adapun laporan kegiatan sebagaimana dimaksud terlampir untuk menjadi bahan dokumentasi dan tindak lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Jayapura, 4 September 2026
Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Prov. Papua

BADAN PENGARAH PAPUA ★ BP3OKP PROV. PAPUA ★ OTONOMI KHUSUS PAPUA

Alberth Yoku, S.Ag

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
2. Badan Pengarah Papua Provinsi Papua (Arsip)

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua



LAPORAN BULANAN AGUSTUS 2026





BPP PROVINSI PAPUA

ANGGOTA BPP

- POKJA PAPUA CERDAS
- POKJA PAPUA SEHAT
- POKJA PAPUA PRODUKTIF
- POKJA POLHUKAM



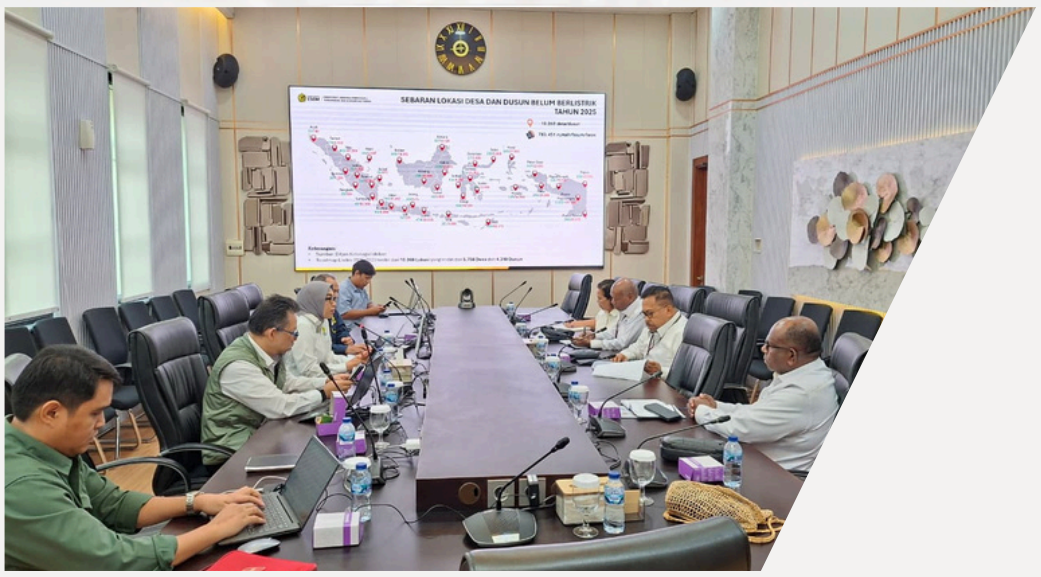












SINKRONISASI • HARMONISASI
EVALUASI • KOORDINASI

POKJA CERDAS - POKJA SEHAT -
POKJA PRODUKTIF - POKJA POLHUKAM

JAYAPURA, AGUSTUS 2026

DAFTAR ISI

Cover 1

Ringkasan Eklusif 2

Daftar Isi 3

Kegiatan Anggota BPP 4

Kegiatan Pokja Papua Cerdas 16

Kegiatan Pokja Papua Sehat 24

Kegiatan Pokja Papua Polhukam 32

Kegiatan Pokja Papua Produktif 46

Kesimpulan 55

Penutup 56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama Agustus 2026, BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, audiensi, pemantauan, dan pendampingan bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK. Kegiatan yang dilakukan mencakup tata kelola Dana Otsus, pelaksanaan RAPPP 2025–2029, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan OAP, pelindungan bahasa daerah, penanganan masyarakat Papua dari PNG, serta

Dari berbagai kegiatan tersebut, koordinasi dan penyelarasan kebijakan sudah semakin baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penyelarasan perencanaan dan anggaran, pembaruan data OAP, pengelolaan Dana Otsus, kesiapan fasilitas pelayanan dasar, dan koordinasi antarinstansi. Karena itu, peran BPP/BP3OKP sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat.

Prioritas tindak lanjut difokuskan pada penyelarasan program dengan RIPPP/RAPPP, perbaikan tata kelola Dana Otsus, pembaruan data OAP, peningkatan pelayanan dasar, serta pemantauan hasil pelaksanaan program agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.



ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua

ANGGOTA
BADAN PENGARAH PAPUA

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

AGUSTUS
2026

Badan Pengarah Papua

Perwakilan Provinsi Papua

Kegiatan Strategis

Selama bulan Agustus 2026, Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP)/Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua.

Kegiatan Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua

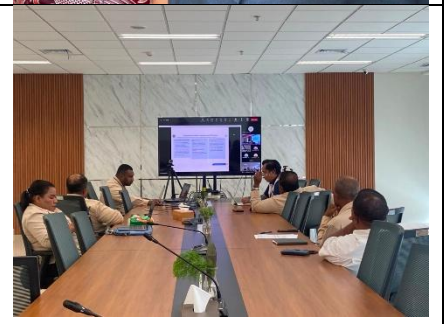
No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – Audiensi dan koordinasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait perubahan jadwal pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 1 Agustus 2026	1. Membahas perubahan jadwal kongres. 2. Menyesuaikan rencana dan anggaran kegiatan. 3. Memperkuat koordinasi BPP dan Badan Bahasa.	1. Jadwal kongres berubah dari 26–28 Agustus menjadi 28 Oktober 2026, dengan lokasi tetap di Provinsi Papua. 2. Penyesuaian RAB dan dokumen anggaran akibat perubahan jadwal. 3. Kesepakatan pembagian peran Badan Bahasa sebagai penyelenggara pusat dan BPP sebagai panitia lokal. 4. Koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk menetapkan format, durasi, dan kebutuhan kegiatan.	1. Menetapkan format dan durasi kegiatan. 2. Menyesuaikan dan memfinalisasi RAB. 3. Memastikan tempat, akomodasi, dan kebutuhan kegiatan. 4. Menyusun struktur panitia lokal.	 
2	Rapat Pleno Bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). 1 Agustus 2026	Kegiatan dijadwalkan ulang oleh Setwapres dan masih menunggu konfirmasi jadwal pelaksanaan selanjutnya.			
3	Komisi Pemberantasan Korupsi – Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Bersama Komisi. 2 – 4 Agustus 2026	Mendorong perbaikan tata kelola Dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terintegrasi melalui penguatan regulasi, data OAP, pengawasan, serta koordinasi lintas pihak.	Menyamakan pemahaman dan membahas langkah yang perlu dilakukan bersama untuk memperbaiki tata kelola Dana Otsus Papua.	Perlu melanjutkan penyelesaian regulasi dan pendataan OAP, memperkuat pengawasan Dana Otsus, serta menyelaraskan perencanaan dengan RIPPP dan RAPPP. Koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih baik.	

4.	Pemantauan dan Koordinasi Penanganan Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. 5 Agustus 2026	Memantau penanganan korban dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik.	Mempercepat pemeriksaan sampel, memperkuat pengawasan keamanan pangan, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan penanganan lanjutan.	Penanganan korban berjalan melalui koordinasi lintas sektor. Sekitar 65 pasien telah ditangani di RSUD Yowari dan sebagian besar dalam kondisi stabil. Kebutuhan obat, ruang rawat, logistik, dan rujukan telah dikoordinasikan, sementara investigasi penyebab kejadian masih berlangsung.	 
5	Audiensi/koordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait Program Papua Terang. 5 Agustus 2026	Membahas kebutuhan listrik dan pengembangan energi terbarukan di wilayah Papua.	BPP dan Ditjen EBTKE membahas kebutuhan listrik serta potensi energi terbarukan di Papua. Disampaikan kendala listrik yang masih berdampak pada rumah sakit, sekolah, dan usaha pengolahan sagu, serta rencana pengembangan PLTS dan PLTMH di beberapa wilayah Papua.	Penyusunan usulan program energi yang sesuai kebutuhan Papua, survei potensi energi terbarukan di daerah, serta koordinasi dengan PLN untuk mendukung ketersediaan listrik bagi fasilitas pelayanan dasar, khususnya rumah sakit.	
6	Audiensi guna mendiskusikan sinergi peran BPP dalam implementasi RAPPP, rencana Tim Implementasi RAPPP dan Pokja, serta penguatan Koordinasi BPP dengan Kementrian PPN/Bappernas. 5 Agustus 2026	Membahas sinergi BPP dalam implementasi RAPPP, rencana Tim Implementasi RAPPP dan Pokja, serta penguatan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas.	Dibahas rencana pelaksanaan 19 poin komitmen, penguatan data OAP dan *tagging* Dana Otsus, penyelarasan perencanaan, serta pembentukan Task Force/Gugus Tugas untuk mendukung pelaksanaan RAPPP.	Melanjutkan pembaharuan data OAP, penyelarasan perencanaan, dan pembentukan Task Force/Gugus Tugas serta memperkuat koordinasi antara BPP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.	

7	Anggota Pokja Papua Sehat dan Polhukam Perwakilan Provinsi Papua Mewakili Anggota BPP Provinsi Papua Melakukan Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029 10 Agustus 2026	Memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah pelaksanaan RAPPP 2025–2029.	Penguatan koordinasi pusat dan daerah, integrasi data pembangunan Papua, serta pemetaan program agar tidak tumpang tindih. Rapat juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala serta memperkuat peran BP3OKP dalam koordinasi pembangunan Papua. Selain itu, telah dibentuk Tim Terpadu untuk mendukung sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan RAPPP.	Memperkuat koordinasi, mengintegrasikan data pembangunan, memetakan program pusat dan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi RAPPP secara berkala.	
8	Zoom/Podcast MPSI – “Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua” 10 Agustus 2026	Membahas tantangan, potensi, dan arah pembangunan Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.	Menjadi narasumber, menyampaikan potensi dan tantangan pembangunan Papua, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat adat, peningkatan kesejahteraan OAP, serta peran generasi muda dalam pembangunan. Turut ditekankan pentingnya pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis, adat, budaya, dan sosial Papua serta penguatan empat pilar Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai.	Mendorong pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat, penguatan peran masyarakat adat dan SDM Papua, serta sinkronisasi pembangunan untuk mendukung kesejahteraan OAP.	 
9	Audiensi pembahasan terkait berakhirnya Akreditasi BLUD RSUD Abepura pad abulan Mei 2027 maka direncakan untuk survei reakreditas pad bulan Desember 2026 dan permintaan vasilitas pemenuhan sarana alat kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia 11 Agustus 2026	Melaksanakan audiensi RSUD Abepura dengan BPP/BP3OKP untuk menyampaikan kondisi aktual rumah sakit, kesiapan menghadapi reakreditasi Desember 2026, serta kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi lintas pemerintah.	RSUD Abepura menyampaikan kesiapan reakreditasi yang saat ini sekitar 67–70% dan masih membutuhkan dukungan untuk rehabilitasi, sarana prasarana, alat kesehatan, serta pembiayaan operasional. Rumah sakit juga akan menyiapkan dokumen kebutuhan secara lebih lengkap sebagai bahan koordinasi lebih lanjut.	BPP akan mengoordinasikan kebutuhan RSUD Abepura dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, BPJS, dan pihak terkait lainnya, terutama terkait pembiayaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan.	

10	DPRK_Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Tanah Nimboran. 11 Agustus 2026	Koordinasi BPP dengan DPRK Jayapura untuk menindaklanjuti permasalahan tanah adat di Distrik Nimbokrang, mengidentifikasi kendala penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi, serta mendorong koordinasi lintas pihak.	Permasalahan tanah yang telah berlangsung sejak 2014 masih belum menemukan penyelesaian yang disepakati semua pihak. Dalam rapat dibahas perbedaan pandangan mengenai status dan batas tanah serta perlunya menelusuri kembali data, dokumen, dan penanganan sebelumnya.	BPP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, MRP, dan DPRK Jayapura untuk menelusuri data dan melakukan verifikasi lapangan. Proses penyelesaian akan terus didorong melalui komunikasi dan koordinasi dengan kedua pihak agar situasi tetap kondusif. Selain itu, BPP akan menindaklanjuti permintaan sosialisasi RIPPP dan RAPPP kepada DPRK Jayapura.	 
11	DPRK Jayapura_Pansus Otsus DPRK Jayapura_Koordinasi mengenai kebijakan, perencanaanm pengalokasia, pelaksanaan, serta Evaluasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS). 12 Agustus 2026	Membahas pelaksanaan Otsus, khususnya perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi Dana Otsus agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi OAP.	Dibahas penguatan pengawasan Dana Otsus, perencanaan yang melibatkan masyarakat, serta keterbukaan data dan anggaran. Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian, termasuk data OAP, layanan JKN, fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keamanan pangan. Selain itu, dibahas penguatan kebijakan afirmasi dan pemberdayaan pengusaha OAP.	BPP dan DPRK Jayapura akan memperkuat koordinasi dalam pengawasan Dana Otsus, memperbaiki data OAP, menyelaraskan perencanaan dengan RIPPP dan RAPPP, serta menindaklanjuti kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha OAP.	 

12	Pertemuan dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri_rangka pembahasan isu data dan administrasi pengungsi masyarakat Papua di Papua Nugini (PNG). ST-96/SETBPP/JYP/2026. 12 - 13 Agustus 2026	Pada 12 Agustus 2026, dilaksanakan koordinasi teknis untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pendataan dan perekaman kependudukan bagi warga Papua yang kembali ke NKRI, mengidentifikasi mekanisme verifikasi kewarganegaraan, tantangan pendataan OAP, serta kebutuhan koordinasi dan dukungan teknis di wilayah perbatasan Papua.	1. Pendataan warga Papua yang kembali dari luar negeri memerlukan alur koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Imigrasi, Dukcapil, Kemlu, BNPP, sektor Polhukam, BPP, dan pemerintah daerah. 2. Verifikasi status kewarganegaraan oleh Imigrasi menjadi tahapan sebelum proses entry dan perekaman oleh Dukcapil. 3. Perekaman dilakukan melalui pendataan manual, input sistem, serta biometrik berupa sidik jari dan iris mata untuk meminimalkan duplikasi data. 4. Verifikasi status OAP masih menghadapi tantangan, khususnya dalam membedakan OAP dengan warga yang lahir di Papua tetapi bukan OAP. 5. Ditjen Dukcapil dapat memberikan dukungan perekaman jemput bola menggunakan perangkat mobile, termasuk melalui PLBN Sota, Skouw, dan Yetetkun.	1. Menyusun alur koordinasi lintas lembaga dalam pendataan warga Papua yang kembali dari PNG. 2. Melakukan koordinasi lanjutan dengan Ditjen Dukcapil untuk memperoleh dukungan teknis perekaman. 3. Mengumpulkan dan menata data manual warga Papua yang kembali dari PNG sebagai bahan verifikasi dan perekaman. 4. Memanfaatkan PLBN Sota, PLBN Skouw, dan PLBN Yetetkun sebagai titik pendukung pelaksanaan perekaman. 5. Menyusun surat koordinasi resmi BPP kepada instansi terkait sebagai dasar audiensi dan koordinasi teknis lebih lanjut.	
13	Audiensi dan Permintaan Kelengkapan Data mahasiswa Fakultas kedokteran Uncen 13 Agustus 2026	Membahas kondisi mahasiswa kedokteran asal Papua yang mengalami kendala masa studi, ujian kompetensi, dan pembiayaan.	Kondisi mahasiswa yang masih menghadapi kendala akademik dan pembiayaan serta kebutuhan dukungan melalui Program Afirmasi Plus. Mahasiswa menyampaikan data dan kondisi masing-masing sebagai bahan untuk melihat kebutuhan dukungan dan tindak lanjut.	Data mahasiswa akan dilengkapi sebagai dasar koordinasi dengan Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Uncen, IDI Wilayah Papua, dan pemerintah daerah asal mahasiswa untuk menindaklanjuti kebutuhan pembiayaan dan Program Afirmasi Plus.	 
14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, DKI Jakartaa_Dalam rangka pembahasan isu data dan administrasi pengungsi masyarakat Papua di Papua Nugini (PNG)_Pak Bernadicto. ST-96/SETBPP/JYP/2026. 14 Agustus 2026	Pada 14 Agustus 2026, dilaksanakan koordinasi dengan BNPP untuk membahas inisiatif pemulangan pengungsi asal Indonesia di Papua Nugini (PNG), memetakan kewenangan institusional, mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait, serta menentukan langkah prosedural untuk	1. Isu pemulangan pengungsi Papua dari PNG dinilai kompleks dan memerlukan pendekatan multisektor karena melibatkan berbagai kewenangan kementerian/lembaga. 2. Unit Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP diidentifikasi sebagai unit yang relevan karena berkaitan dengan lalu lintas manusia di perbatasan dan pengelolaan PLBN. 3. Kementerian Luar Negeri dipandang memiliki peran penting sebagai leading sector dalam urusan pengungsi dan perundingan perbatasan, sedangkan Kemenko Polhukam berperan dalam koordinasi isu terkait di tingkat pusat.	1. Menyusun dan mengirimkan surat permohonan audiensi resmi kepada Sekretaris BNPP. 2. Melampirkan bahan pendukung dalam bentuk fisik dan PDF mengenai agenda dan tujuan audiensi terkait pemulangan pengungsi. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan audiensi tatap muka setelah surat diterima dan diproses oleh BNPP. 4. Mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait dalam	

		pelaksanaan audiensi resmi lintas sektoral.	4. Audiensi resmi dengan BNPP perlu ditujukan kepada Sekretaris BNPP agar dapat didisposisikan kepada unit teknis terkait, khususnya Direktorat Tasbara dan Direktorat Batas Darat. 5. Audiensi disepakati lebih efektif dilaksanakan secara tatap muka dengan penyampaian bahan pendukung yang menjelaskan agenda dan tujuan pembahasan.	rangka penanganan isu pemulangan pengungsi Papua dari PNG.	
15	ST-54/BPP-P/JYP/2026 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam rangka pembahasan isu data dan administrasi pengungsi masyarakat Papua di Papua Nugini (PNG) _ . ST-96/SETBPP/JYP/2026. 14 Agustus 2026	Pada 14 Agustus 2026, dilaksanakan Pulbaket dengan Diplomat Ahli Madya Direktorat Pasifik dan Oseania untuk memperoleh analisis mengenai rencana repatriasi warga asal Papua yang telah lama bermukim di PNG, meliputi aspek historis, data populasi, kewarganegaraan, sosial, keamanan, serta risiko konflik horizontal.	1. Repatriasi massal saat ini dinilai tidak layak dan berisiko tinggi, karena dapat menimbulkan konflik horizontal, kecemburuan sosial, dan persoalan administrasi serta kewarganegaraan. 2. Belum tersedia data pengungsi yang valid dan terverifikasi secara “by name, by address”, serta terdapat kompleksitas status kewarganegaraan generasi kedua dan ketiga. 3. Repatriasi berpotensi menimbulkan persoalan kesiapan lahan, hunian, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan penerimaan sosial. 4. Belum terdapat komplain atau permintaan resmi dari Pemerintah PNG terkait keberadaan komunitas pengungsi tersebut. 5. Jika dilakukan pemulangan, perlu dilakukan secara bertahap dan selektif, berdasarkan permintaan individu/keluarga yang terverifikasi dan kesiapan penerimaan di Indonesia.	1. Tidak mendorong repatriasi massal pengungsi Papua dari PNG dalam kondisi saat ini. 2. Melakukan verifikasi faktual/joint verification untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, dan jumlah warga yang benar-benar ingin kembali. 3. Pemulangan dilakukan secara selektif dan bertahap, berdasarkan permintaan individu/keluarga serta kesiapan sosial-administratif. 4. Melakukan kajian cost-benefit secara mendalam dengan memperhatikan kesiapan lahan, layanan dasar, pekerjaan, penerimaan masyarakat, serta potensi konflik horizontal. 5. Mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kebijakan repatriasi tidak menimbulkan persoalan sosial dan keamanan baru.	
16	Mengikuti Zoom Lokakarya Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II TA 2026 dan Workshop Penyusunan RAP Awal Dana Otsus Papua TA 2027 melalui Aplikasi Interoperabilitas (Batch 2). 18 – 22 Agustus 2026	Memahami mekanisme percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II TA 2026 serta penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui aplikasi interoperabilitas.	Diperoleh pemahaman mengenai persyaratan penyaluran Dana Otsus dan DTI, pengelolaan SiLPA, serta penyusunan RAP Awal TA 2027 melalui integrasi SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus.	Mendorong pemerintah daerah melengkapi persyaratan penyaluran Dana Otsus dan DTI serta memperkuat koordinasi antara Bappeda/Bapperida, BPKAD, OPD, dan Inspektorat untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen. Penggunaan SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus juga perlu dioptimalkan untuk mendukung penyusunan RAP Awal TA 2027 yang lebih sinkron dengan prioritas pembangunan Papua.	

17	Rapat Koordinasi Program Sekolah Rakyat bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua 20 Agustus 2026	Memperoleh informasi perkembangan pembangunan Program Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor, termasuk kendala pelaksanaan dan keterlibatan Subkontraktor OAP.	Realisasi fisik per 20 Agustus 2026 mencapai 28,50% di Kota Jayapura, 21,75% di Biak Numfor, dan 12,40% di Sarmi. Pelaksanaan masih menghadapi kendala geografis, logistik, ketersediaan material lokal, dan cuaca. Sebanyak 14 Subkontraktor OAP telah dilibatkan, terdiri dari 6 di Kota Jayapura, 5 di Biak Numfor, dan 3 di Sarmi.	Melakukan koordinasi lanjutan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua terkait perkembangan pembangunan dan kendala di lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai fact sheet, maket visual, dan penyelesaian pembayaran termin Subkontraktor OAP.	
18	Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026 Bappernas. 20 – 21 Agustus 2026	Melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan dengan RAPPP Tahun 2025–2029.	Telah dilakukan pembahasan, pendampingan, dan asistensi terhadap usulan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, serta kabupaten/kota di wilayah sasaran, termasuk penajaman program pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penguatan Papua Cerdas.	Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil pendampingan dengan menyempurnakan usulan program dan kegiatan, menyesuaikannya dengan RAPPP Tahun 2025–2029, serta memperjelas indikator dan target kinerja, khususnya pada program pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.	 
19	Bappernas_Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026. (Zoom) 24 Agustus 2026	Mengikuti rapat tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 dan penyelarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025–2029.	Memperoleh informasi status penyelarasan usulan daerah, penyelesaian Berita Acara, serta daerah yang masih memerlukan perbaikan dan pendampingan lanjutan.	Mendorong pemerintah daerah yang belum selesai untuk segera melakukan perbaikan dan penyelesaian dokumen, serta BPP melakukan pemantauan tindak lanjut sesuai fungsi SHEK.	

					
20	Kunjungan Kemenlu (10514/DM/08/2026/61) Menghadiri dan mengikuti pertemuan dengan Delegasi Kementerian Luar Negeri dalam rangka pembahasan perkembangan pembangunan Papua serta penguatan peran Papua dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik pada senin 24 Agustus 2026, di Swiss-Belhotel Jayapura. 24 Agustus 2026	Mengidentifikasi perkembangan dan tantangan pembangunan Papua serta membahas peluang penguatan peran Papua dalam kerja sama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.	Teridentifikasi isu strategis pembangunan Papua meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan dan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, ekonomi kreatif, serta pengembangan generasi muda. Selain itu, terpetakan potensi dan peluang kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik serta kebutuhan penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.	Memperkuat pembangunan SDM dan pendekatan pembangunan yang humanis dan berorientasi pada perdamaian, meningkatkan peran masyarakat asli Papua, serta mengembangkan potensi budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Mendorong kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, dan kepemudaan serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan.	 

21	Rapat Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 di Tanah Papua pada. 24 Agustus 2026.	1. Mengikuti kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 di Tanah Papua sebagai bahan yang akan disampaikan pada Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 2. Memberikan masukan dalam perumusan isu strategis dan langkah pelindungan bahasa daerah di Tanah Papua dengan memperhatikan kepentingan Orang Asli Papua. 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) BP3OKP, khususnya dalam bidang Papua Cerdas.	1. Disepakati 6 (enam) Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa Daerah di Tanah Papua, meliputi: • Pewarisan Bahasa Antargenerasi; • Regulasi dan Implementasi Kebijakan Otsus; • Kurikulum dan SDM Pendidikan; • Dokumentasi dan Digitalisasi Bahasa; • Sikap Bahasa dan Ruang Publik; dan • Kolaborasi Multipihak. 2. Diperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta usulan strategis dalam pelindungan bahasa daerah di Tanah Papua. 3. Terbangun komitmen kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRP, MRP, Balai Bahasa, BP3OKP, lembaga adat, akademisi, serta komunitas penggerak bahasa. 4. Dihasilkan Berita Acara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah tanggal 24 Agustus 2026, yang menjadi dasar penyampaian hasil pada Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.	Penyampaian dan pengawalan 6 (enam) Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa Daerah di Tanah Papua pada Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.	 
22	Rapat Audiensi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Bahasa/Balai Bahasa dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk membahas persiapan Kongres Bahasa Daerah. 25 Agustus 2026.	Koordinasi persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 di Provinsi Papua, termasuk dukungan dan sinergi antara Balai Bahasa dan Pemerintah Provinsi Papua. Kongres ini merupakan program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang melibatkan pemerintah daerah se-Tanah Papua	Memperolah informasi dan pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah, termasuk kebutuhan koordinasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyukseskan kegiatan.	Koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut antara Balai Bahasa, Pemerintah Provinsi Papua, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 serta menindaklanjuti hasil pertemuan sesuai kewenangan masing-masing.	

23	Audiensi dan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta perihal penanganan mahasiswa Program Profesi Dokter dan retaker yang menghadapi berakhirnya masa studi. 24 - 28 Agustus 2026	Mengoordinasikan percepatan peningkatan layanan kesehatan di Papua, khususnya terkait akses rujukan, penguatan SDM dokter spesialis, pembangunan dan kesiapan operasional fasilitas kesehatan, serta dukungan sarana dan prasarana.	1. Diperlukan percepatan pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, termasuk listrik, alkes, laboratorium, dan konektivitas, serta validasi kondisi fasilitas melalui pemantauan lapangan. 2. Tersedianya kuota dokter spesialis minimal 10 peserta per kabupaten, dengan biaya pendidikan ditanggung melalui dukungan Wakil Presiden, dan diperlukan finalisasi data serta persyaratan seleksi untuk ditindaklanjuti kepada Kementerian Kesehatan. 3. Teridentifikasi sejumlah kendala pembangunan dan operasional rumah sakit/puskesmas, antara lain akses geografis, proses tender, lokasi pembangunan, serta keterbatasan dukungan operasional. 4. Diperlukan penguatan koordinasi dan monitoring lintas pihak untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pembangunan, dan operasional fasilitas kesehatan berjalan sesuai kebutuhan daerah.	1. Mendorong koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pemenuhan sarana prasarana dan kesiapan operasional fasilitas kesehatan. 2. Mendorong finalisasi data calon dokter spesialis dan persyaratan seleksi untuk segera ditindaklanjuti kepada Kementerian Kesehatan sesuai kebutuhan daerah. 3. Memperkuat monitoring lapangan dan validasi data terkait kondisi sarana prasarana, progres pembangunan, serta kendala operasional sebagai bahan koordinasi dan pengambilan kebijakan. 4. Mendorong penguatan mekanisme rujukan dan dukungan transportasi kesehatan, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis. 5. Melakukan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut bersama pihak terkait sebagai bagian dari fungsi SHEK BPP/BP3OKP.	
24	Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Implementasi Dana Otonomi Khusus Papua serta Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 27 Agustus 2026	Menjadi narasumber untuk membahas penguatan tata kelola Dana Otsus serta sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaannya antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.	Dalam rapat dibahas kondisi pelaksanaan Dana Otsus di daerah, termasuk masih adanya kendala dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan. Selain itu, dibahas pentingnya penggunaan SIKD, SIPD, dan SIP3 secara terintegrasi, ketersediaan data OAP yang akurat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan lembaga terkait.	Koordinasi lanjutan dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, dan BP3OKP untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus, penyelarasan data OAP, interoperabilitas sistem, serta harmonisasi regulasi dan pelaporan.	
25	Verifikasi dan Penyelarasan terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. 27 Agustus 2026	Memastikan program kerja yang disusun selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.	Program dan kegiatan telah diverifikasi dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua. Pembahasan juga mencakup indikator, target, dan pendanaan agar program yang direncanakan lebih tepat sasaran dan mendukung target pembangunan daerah.	Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPRK Kabupaten Jayapura, dan BPP untuk mendukung penguatan kapasitas, penyempurnaan tata tertib, serta peningkatan akses informasi dan pengawasan Dana Otsus.	

26	Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Kabupaten Jayapura bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 28 Agustus 2026	Menjadi narasumber untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas anggota DPRK jalur pengangkatan terkait kedudukan, tugas, fungsi, hak, dan kewenangannya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.	Terdapat penegasan bahwa DPRK jalur pengangkatan memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan anggota DPRK hasil pemilu. Rapat juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, termasuk keterbatasan akses informasi anggaran, dominasi politik, belum optimalnya sekretariat kelompok khusus, serta pengawasan dana Otsus. BPP menyatakan kesiapan menjadi jembatan koordinasi antara DPRK dan pemerintah pusat.	Memperkuat peran dan kedudukan DPRK jalur pengangkatan melalui penyempurnaan Tata Tertib, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan tenaga ahli, penguatan koordinasi dengan BPP dan Kemendagri, serta peningkatan transparansi dan pengawasan pengelolaan dana Otsus.	
27	Menerima Permohonan Pertemuan dengan Kelompok Pengusaha Orang Asli Papua. 31 Agustus 2026	Mendengarkan permohonan Menerima dan mendengarkan aspirasi kelompok pengusaha OAP terkait pemanfaatan dan pengelolaan anggaran Otsus.	Diperoleh aspirasi dan informasi dari kelompok pengusaha OAP terkait pemanfaatan anggaran Otsus serta kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.	BPP akan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRK sesuai kewenangan masing-masing serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut aspirasi kelompok pengusaha OAP terkait pemanfaatan anggaran Otsus.	

POKJA PAPUA CERDAS

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

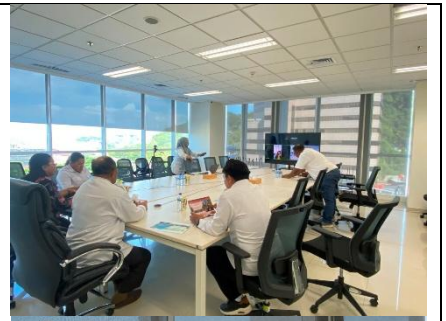
AGUSTUS 2026

Badan Pengarah Papua

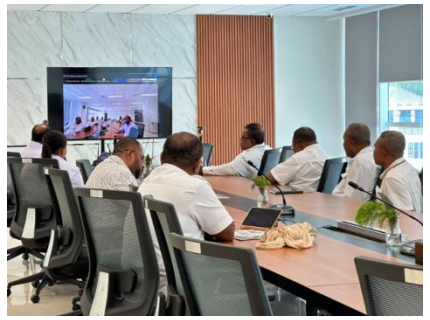
Perwakilan Provinsi Papua

Kegiatan Bulan Agustus 2026 Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Papua (BPP)/Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Pemantauan dan Koordinasi Penanganan Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. 5 Agustus 2026	Pada tanggal 5 Agustus 2026, dilaksanakan monitoring dan koordinasi untuk memastikan penanganan korban terindikasi keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, mengidentifikasi kebutuhan dan kendala di lapangan, serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.	Mempercepat investigasi dan pengujian sampel, memperkuat pengawasan keamanan pangan dan SOP penanganan kejadian, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, serta memperkuat komunikasi publik dan monitoring lanjutan terhadap pelaksanaan Program MBG.	Penanganan korban berjalan melalui koordinasi lintas sektor. Sekitar **65 pasien** telah ditangani di RSUD Yowari dan sebagian besar dalam kondisi stabil. Kebutuhan obat, ruang rawat, logistik, dan rujukan telah dikoordinasikan, sementara investigasi penyebab kejadian masih berlangsung.	  

2	Podcast MPSI Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua (zoom) 10 Agustus 2026	Pada 10 Agustus 2026, dilaksanakan Podcast/Wawancara MPSI bertema “Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua” untuk membahas arah pembangunan Papua dalam kerangka Otonomi Khusus, tantangan pembangunan, potensi ekonomi dan sumber daya alam, hak ulayat, pembangunan OAP, peran BPP, serta arah pembangunan menuju Papua Emas 2041	1. Papua memiliki potensi SDA, masyarakat adat, generasi muda, dan kelembagaan sebagai modal pembangunan. 2. Tantangan utama meliputi geografis, infrastruktur, kesejahteraan OAP, kesehatan, keamanan, dan kapasitas SDM. 3. Masyarakat adat, klan, dan marga perlu menjadi subjek utama pembangunan, termasuk dalam pengelolaan potensi ekonomi. 4. Pembangunan perlu dilakukan secara kontekstual, partisipatif, dan bottom-up dengan memperhatikan adat dan budaya Papua. 5. Empat pilar Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai perlu dilaksanakan secara terintegrasi.	1. Memetakan potensi ekonomi berbasis wilayah adat dan memperkuat kelembagaan ekonomi OAP. 2. Mendorong transformasi ekonomi OAP menuju usaha produktif dan bernilai tambah. 3. Mengembangkan program Sarjana Pulang Kampung untuk mendukung pembangunan kampung. 4. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dari tingkat kampung hingga pusat. 5. Memperkuat pendekatan damai dan penanganan isu secara kontekstual sesuai karakteristik wilayah.	 
3	Audiensi dan Permintaan Kelengkapan Data mahasiswa Fakultas kedokteran Uncen 13 Agustus 2026	Pada 13 Agustus 2026, dilaksanakan audiensi BPP dengan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi mengenai kondisi mahasiswa pendidikan profesi dokter asal Papua yang menghadapi kendala masa studi, pengulangan UKMPPD, dan keterbatasan pembiayaan, serta merumuskan pola koordinasi dan dukungan melalui fungsi SHEK BPP.	1. Terdapat sekitar 120 retaker tahun 2024–2025, dengan sebagian mahasiswa telah mengikuti UKMPPD lebih dari 5 kali, serta sekitar 100 mahasiswa terancam melewati batas masa studi. 2. FK Uncen telah melakukan pendataan ulang, penataan home-base, pembaruan PDDikti, revisi kurikulum, perluasan rotasi klinik, kerja sama dengan RSUD Abepura, dan program khusus ujian. 3. Program afirmasi memberikan dampak positif terhadap kelulusan mahasiswa, dengan 122 peserta dari sekitar 177 dokter umum yang lulus pada 2025 melalui jalur afirmasi. 4. Program Afirmasi Plus direncanakan melalui reschooling sekitar dua bulan di FK Unhas dan persiapan ujian kompetensi, namun masih memerlukan kepastian dasar hukum dan pembiayaan. 5. Diperlukan data mahasiswa berdasarkan nama, daerah asal, status masa studi, dan kondisi akademik, serta rincian kebutuhan biaya sebagai dasar koordinasi dengan pemerintah daerah. 6. BPP Papua akan memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan Afirmasi Plus.	1. FK Uncen segera memfinalisasi data mahasiswa yang membutuhkan Afirmasi Plus dan rincian kebutuhan biayanya. 2. BPP Papua melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal mahasiswa untuk memperoleh dukungan pembiayaan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. 3. BPP Papua berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong kepastian kebijakan, legalitas, dan mekanisme Afirmasi Plus. 4. Membentuk forum/grup koordinasi lintas pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPP Papua, dan FK Uncen. Memfasilitasi pertemuan BPP–Pemda–FK Uncen untuk memperoleh komitmen konkret terhadap pembiayaan dan pelaksanaan Afirmasi Plus.	

4.	Mengikuti Zoom Lokakarya Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II TA 2026 dan Workshop Penyusunan RAP Awal Dana Otsus Papua TA 2027 melalui Aplikasi Interoperabilitas (Batch 2). 18 – 22 Agustus 2026	Mengikuti lokakarya untuk memperoleh pemahaman mengenai percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026, pengelolaan SiLPA, serta mekanisme penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus.	Mengikuti lokakarya untuk memperoleh pemahaman mengenai percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026, pengelolaan SiLPA, serta mekanisme penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus	1. Mendorong pemerintah daerah untuk segera memenuhi dan melengkapi dokumen persyaratan salur Dana Otsus dan DTI Tahap II TA 2026 sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi antar-OPD, Bappeda/Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat dalam memastikan kesesuaian data realisasi, capaian keluaran, dan dokumen pendukung. 3. Mendorong pemanfaatan interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus secara optimal untuk mendukung penyusunan RAP Awal TA 2027 yang lebih akurat, sinkron, dan sesuai dengan prioritas pembangunan Papua.	
5	Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026 Bappernas. 20 – 21 Agustus 2026	Melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan dengan RAPPP Tahun 2025–2029.	Telah dilakukan pembahasan, pendampingan, dan asistensi terhadap usulan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, serta kabupaten/kota di wilayah sasaran, termasuk penajaman program pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penguatan Papua Cerdas.	Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil pendampingan dengan menyempurnakan usulan program dan kegiatan, menyesuaikannya dengan RAPPP Tahun 2025–2029, serta memperjelas indikator dan target kinerja, khususnya pada program pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia	 

6	Bappernas_Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026. (Zoom) 24 Agustus 2026 Keseluruhan Pokja	Mengikuti rapat tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 dan penyelarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025–2029.	Diperoleh informasi terkait status penyelarasan usulan daerah, penyelesaian Berita Acara, serta daerah yang masih memerlukan perbaikan dan pendampingan lanjutan.	Mendorong pemerintah daerah yang belum selesai untuk segera melakukan perbaikan dan penyelesaian dokumen, serta BPP melakukan pemantauan tindak lanjut sesuai fungsi SHEK.	
7	Kunjungan Kemenlu (10514/DM/08/2026/61) Menghadiri dan mengikuti pertemuan dengan Delegasi Kementerian Luar Negeri dalam rangka pembahasan perkembangan pembangunan Papua serta penguatan peran Papua dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik pada senin 24 Agustus 2026, di Swiss-Belhotel Jayapura. 24 Agustus 2026	Mengidentifikasi perkembangan dan tantangan pembangunan Papua serta membahas peluang penguatan peran Papua dalam kerja sama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.	Teridentifikasi isu strategis pembangunan Papua meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan dan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, ekonomi kreatif, serta pengembangan generasi muda. Selain itu, terpetakan potensi dan peluang kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik serta kebutuhan penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.	Memperkuat pembangunan SDM dan pendekatan pembangunan yang humanis dan berorientasi pada perdamaian, meningkatkan peran masyarakat asli Papua, serta mengembangkan potensi budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Mendorong kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, dan kepemudaan serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan.	 

8	Rapat Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 di Tanah Papua pada. 24 Agustus 2026.	1. Mengikuti kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 di Tanah Papua sebagai bahan yang akan disampaikan pada Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 2. Memberikan masukan dalam perumusan isu strategis dan langkah pelindungan bahasa daerah di Tanah Papua dengan memperhatikan kepentingan Orang Asli Papua. 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) BP3OKP, khususnya dalam bidang Papua Cerdas.	1. Disepakati 6 (enam) Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa Daerah di Tanah Papua, meliputi: • Pewarisan Bahasa Antargenerasi; • Regulasi dan Implementasi Kebijakan Otsus; • Kurikulum dan SDM Pendidikan; • Dokumentasi dan Digitalisasi Bahasa; • Sikap Bahasa dan Ruang Publik; dan • Kolaborasi Multipihak. 2. Diperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta usulan strategis dalam pelindungan bahasa daerah di Tanah Papua. 3. Terbangun komitmen kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRP, MRP, Balai Bahasa, BP3OKP, lembaga adat, akademisi, serta komunitas penggerak bahasa. 4. Dihasilkan Berita Acara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah tanggal 24 Agustus 2026, yang menjadi dasar penyampaian hasil pada Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.	Penyampaian dan pengawalan 6 (enam) Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa Daerah di Tanah Papua pada Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.	 
9	Rapat Audiensi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Bahasa/Balai Bahasa dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk membahas persiapan Kongres Bahasa Daerah. 25 Agustus 2026.	Membahas dan mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 di Provinsi Papua, termasuk dukungan dan sinergi antara Balai Bahasa dan Pemerintah Provinsi Papua. Kongres ini merupakan program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang melibatkan pemerintah daerah se-Tanah Papua	Diperoleh informasi dan pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah, termasuk kebutuhan koordinasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyukseskan kegiatan.	Mendorong koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut antara Balai Bahasa, Pemerintah Provinsi Papua, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 serta menindaklanjuti hasil pertemuan sesuai kewenangan masing-masing.	
10	Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Implementasi Dana Otonomi Khusus Papua serta Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 27 Agustus 2026	1. Mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya dalam tata kelola, perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus. 2. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan koordinasi antarinstansi melalui interoperabilitas sistem SIKD, SIPD, dan SIP3. 3. Mengidentifikasi kendala kelembagaan, pengelolaan dana Otsus, serta	1. Teridentifikasi masih adanya kendala dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus di daerah. 2. Ditekankan pentingnya interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta penguncian tahapan perencanaan untuk meningkatkan sinkronisasi dan disiplin anggaran. 3. Diperlukan penguatan kelembagaan DPRP, MRP, dan BP3OKP serta peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan Otsus. 4. Ditekankan pentingnya data OAP yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.	1. Memperkuat tata kelola dan pengawasan dana Otsus melalui perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. 2. Memastikan interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari mekanisme penyaluran dana Otsus. 3. Menyediakan dan menggunakan data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program Otsus. 4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait.	

		ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar perencanaan pembangunan. 4. Mendorong penguatan tata kelola Otsus menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.	5. Disepakati perlunya peningkatan transparansi melalui rekening khusus dana Otsus, pelabelan sumber pendanaan, serta pengawasan berbasis kinerja.	5. Mempercepat harmonisasi regulasi turunan Otsus serta meningkatkan transparansi penggunaan dana melalui rekening khusus dan labeling sumber pendanaan.	
11	Verifikasi dan Penyelarasan terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. 27 Agustus 2026	Melakukan verifikasi dan penyelarasan program kerja Pokja Papua Cerdas dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, termasuk indikator, target, dan pendanaan.	Program dan kegiatan Pokja Papua Cerdas telah diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua. Terdapat kesepahaman mengenai indikator dan target kinerja agar program lebih tepat sasaran serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.	Melanjutkan koordinasi antara Pokja Papua Cerdas dan BAPPERIDA Provinsi Papua untuk mengawal hasil verifikasi dan penyelarasan hingga tahap penganggaran dan penetapan dokumen akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.	
12	Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Kabupaten Jayapura bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 28 Agustus 2026	Memperkuat pemahaman dan kapasitas DPRK jalur pengangkatan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak, serta kewenangannya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, sekaligus membahas berbagai kendala kelembagaan, politik, dan pengawasan dana Otsus.	Terdapat penegasan bahwa DPRK jalur pengangkatan memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan anggota DPRK hasil pemilu. Rapat juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, termasuk keterbatasan akses informasi anggaran, dominasi politik, belum optimalnya sekretariat kelompok khusus, serta pengawasan dana Otsus. BPP menyatakan kesiapan menjadi jembatan koordinasi antara DPRK dan pemerintah pusat.	Memperkuat peran dan kedudukan DPRK jalur pengangkatan melalui penyempurnaan Tata Tertib, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan tenaga ahli, penguatan koordinasi dengan BPP dan Kemendagri, serta peningkatan transparansi dan pengawasan pengelolaan dana Otsus.	 

KESIMPULAN KEGIATAN POKJA PAPUA CERDAS AGUSTUS 2026

Selama bulan Agustus 2026, Pokja Papua Cerdas telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam mendukung Program Papua Cerdas, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Papua. Kegiatan dilakukan melalui pendampingan dan penyelarasan program pendidikan dengan RAPPP 2025–2029 dan prioritas pembangunan daerah, penguatan pendidikan kedokteran bagi putra-putri Papua, serta pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari penguatan pendidikan berbasis budaya Papua.

Program Papua Cerdas terus diperkuat melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pembangunan SDM, penyelarasan program dan anggaran, serta penguatan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Papua. Pokja Papua Cerdas telah melakukan penajaman program, indikator, dan target kinerja bersama pemerintah daerah serta membangun koordinasi lintas pihak untuk memastikan program pendidikan menjadi bagian yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pokja Papua Cerdas akan memfokuskan pengawalan pada pelaksanaan Program Papua Cerdas, terutama melalui pengawalan hasil verifikasi program hingga tahap penganggaran dan penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, pemantauan program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, serta tindak lanjut dukungan bagi mahasiswa kedokteran asal Papua. Selain itu, Pokja akan mengawal pelaksanaan program pelindungan bahasa dan sastra daerah serta memperkuat koordinasi dan monitoring agar program Papua Cerdas berjalan tepat sasaran, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM Papua.

POKJA PAPUA SEHAT

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

AGUSTUS 2026

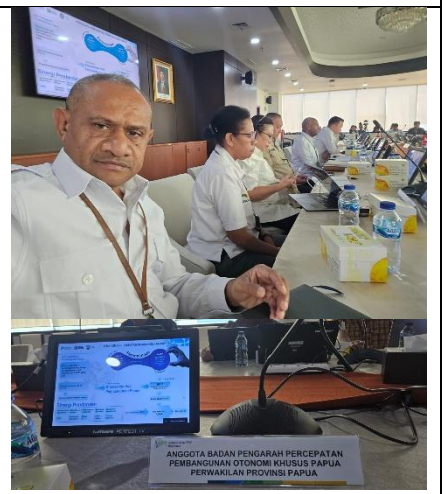
Badan Pengarah Papua

Perwakilan Provinsi Papua

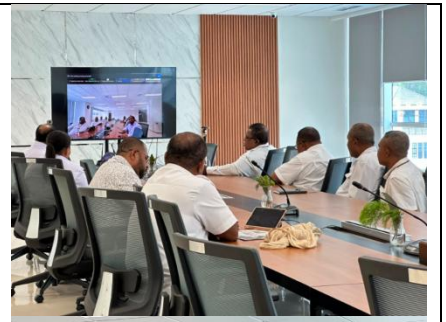
Kegiatan Bulan Agustus 2026 Pokja Papua Sehat Badan Pengarah Papua (BPP)/Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Mendampingi Anggota BPP Provinsi Papua pada kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi – Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Bersama Komisi 2 – 4 Agustus 2026	Mendorong perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua yang lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terintegrasi, melalui penguatan regulasi, penyelarasan perencanaan, pemutakhiran data OAP, penguatan pengawasan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	1. Teridentifikasi kebutuhan penguatan tata kelola Dana Otsus Papua agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat ditelusuri dari tahap perencanaan hingga pelaporan. 2. Diperlukan percepatan penyusunan dan penetapan regulasi turunan mengenai Orang Asli Papua (OAP) serta penguatan basis data OAP yang valid dan terintegrasi. 3. Dibahas kebutuhan penerapan tagging Dana Otsus pada sistem perencanaan, penganggaran, dan pengadaan untuk memudahkan pemantauan penggunaan anggaran. 4. Disepakati pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP, dengan target keselarasan 100%. 5. Teridentifikasi perlunya penguatan pengawasan melalui kanal pengaduan masyarakat, penandaan fisik kegiatan yang dibiayai Dana Otsus, serta pengelolaan melalui rekening khusus. 6. Dibahas penguatan pemberdayaan pelaku usaha OAP melalui kemudahan akses NIB, NPWP, SPSE, dan e-katalog lokal. 7. Disepakati perlunya mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pembentukan Task Force/Gugus Tugas untuk mengawal implementasi komitmen bersama.	1. Mempercepat penetapan Perdasus OAP bagi daerah yang belum menyelesaikannya serta memastikan keseragaman definisi OAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mendorong Kemendagri menyusun regulasi/pedoman teknis terkait sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan Dana Otsus. 3. Mengembangkan sistem tagging Dana Otsus secara terintegrasi pada SIPD, SIKD-Otsus, SIPPP, SIRUP, dan SPSE. 4. Mendorong penyelarasan 100% dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. 5. Meningkatkan kualitas pendataan OAP melalui pembinaan Dukcapil dan pembangunan basis data sosial-ekonomi OAP yang terintegrasi. 6. Membentuk dan menetapkan Task Force/Gugus Tugas tingkat pusat dan daerah untuk memantau pelaksanaan komitmen serta memastikan pencapaian target sesuai *timeline*. 7. Memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat dan transparansi kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus. 8. Meningkatkan kapasitas SDM UKPBJ serta memfasilitasi pelaku usaha OAP agar dapat masuk dalam sistem pengadaan pemerintah. 9. Mendorong pemerintah daerah menetapkan mekanisme BAST saat mutasi pejabat untuk menjamin keberlanjutan data, dokumen, dan pengetahuan program.	 

2	Mendampingi Anggota BPP Provinsi Papua pada kegiatan Audiensi/koordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait Program Papua Terang. 5 Agustus 2026	Pada Rabu, 5 Agustus 2026, dilaksanakan audiensi Badan Pengarah Papua (BPP) dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) untuk membahas potensi dan kebutuhan penyediaan energi listrik serta pengembangan energi terbarukan di wilayah Papua.	1. BPP menawarkan untuk membantu mengawal program-program Kementerian ESDM di wilayah Papua sebagai perwakilan dari Setwapres. 2. Disampaikan potensi energi terbarukan di Papua, antara lain energi angin, pengolahan minyak jelantah, serta potensi pengembangan PLTA dengan memanfaatkan aliran air dari Danau Sentani dengan perkiraan kapasitas 12 MW. 3. Disampaikan masih terdapat kendala ketersediaan listrik yang berdampak pada pelayanan rumah sakit, operasional pabrik pengolahan sagu, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 4. Ditjen EBTKE menyampaikan terdapat 10.068 desa/dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik PLN dan ditargetkan selesai sampai tahun 2029. 5. Pada tahun 2026 dialokasikan pembangunan 39 unit PLTS terpadu yang mayoritas berada di wilayah Papua, serta direncanakan pembangunan 2 unit PLTMH di Papua pada tahun 2027. 6. Kementerian ESDM berkomitmen meningkatkan akses listrik, termasuk melalui pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.	1. BPP akan menyampaikan usulan-usulan program penyediaan energi di wilayah Papua melalui Ditjen EBTKE. 2. Ditjen EBTKE akan melakukan survei ke lokasi pengolahan sagu di Sorong Selatan untuk melihat potensi energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. 3. BPP akan menyampaikan surat kepada Direktur Utama PLN untuk dapat menyediakan listrik 24 jam bagi rumah sakit di wilayah pelosok yang membutuhkan listrik untuk penggunaan peralatan kesehatan.	

3	Mendampingi Anggota BPP Provinsi Papua pada kegiatan Audiensi guna mendiskusikan sinergi peran BPP dalam implementasi RAPPP, rencana Tim Implementasi RAPPP dan Pokja, serta penguatan Koordinasi BPP dengan Kementrian PPN/Bappernas. 5 Agustus 2026	Pada 27 Agustus 2026, dilaksanakan kegiatan Rencana Aksi dan Pemantauan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Papua untuk membahas implementasi komitmen bersama perbaikan tata kelola Dana Otsus, meliputi penguatan regulasi, penajaman sasaran OAP, penerapan *tagging* anggaran, penyelarasan dokumen perencanaan, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas lembaga.	1. Dibahas implementasi 19 poin komitmen bersama melalui matriks rencana aksi dengan target waktu pelaksanaan. 2. Ditekankan penguatan regulasi dan penerapan tagging Dana Otsus agar penggunaan dana dapat ditelusuri dari perencanaan hingga pelaporan. 3. Diperlukan percepatan regulasi dan pendataan OAP yang valid dan terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran Dana Otsus. 4. Disepakati target 100% penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. 5. Dibahas penguatan PBJ melalui pengembangan *tagging* sumber Dana Otsus pada SIRUP dan SPSE, peningkatan kompetensi SDM UKPBJ, serta pemberdayaan pelaku usaha OAP. 6. Disepakati pembentukan Task Force/Gugus Tugas tingkat pusat dan daerah untuk mengawal implementasi rencana aksi. 7. Dibahas penguatan mekanisme pengaduan masyarakat serta kebijakan BAST untuk menjamin kesinambungan data, dokumen, dan pengetahuan dalam pergantian pejabat.	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan Perdasus OAP bagi daerah yang belum menetapkan. 2. Menyusun regulasi terkait sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan Dana Otsus. 3. Mendorong penerapan tagging Dana Otsus secara sistemik pada SIPD, SIKD-Otsus, SIPPP, SIRUP, dan SPSE. 4. Meningkatkan kualitas dan validitas pendataan OAP melalui pembinaan Dukcapil. 5. Mendorong penyelarasan 100% dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. 6. Membentuk dan menetapkan SK Task Force/Gugus Tugas tingkat pusat yang mengintegrasikan peran kementerian/lembaga ke dalam struktur BP3OKP. 7. Memperkuat kapasitas SDM UKPBJ dan memfasilitasi pelaku usaha OAP untuk memperoleh NIB, NPWP, serta integrasi akun ke SPSE dan e-katalog lokal. 8. Mendorong pemerintah daerah membentuk kanal pengaduan masyarakat serta menerapkan BAST yang komprehensif dalam setiap mutasi pegawai.	 
4	Anggota Pokja Papua Sehat dan Polhukam Perwakilan Provinsi Papua mewakili Anggota BPP dalam Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029 untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat komitmen, dan menghimpun masukan strategis bagi percepatan pembangunan Papua. 10 Agustus 2026	Pada 10 Agustus 2026, mengikuti Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 untuk memperkuat komitmen bersama, menyelaraskan arah kebijakan dan langkah implementasi, serta menghimpun masukan strategis guna mendukung pelaksanaan RAPPP 2025–2029 secara lebih efektif.	1. Ditekankan pentingnya sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BP3OKP, MRP, OAP, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam implementasi RAPPP 2025–2029. 2. Ditetapkan bidang prioritas pembangunan Papua meliputi SDM, konektivitas dan infrastruktur, ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan dan pemberdayaan OAP. 3. Diperlukan penguatan integrasi data pembangunan Papua, termasuk data OAP, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, serta program pemerintah pusat dan daerah. 4. Disepakati monitoring dan evaluasi RAPPP secara berkala yang tidak hanya mengukur serapan anggaran, tetapi juga output, outcome, manfaat masyarakat, dampak terhadap OAP, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan dasar.	1. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BP3OKP, dan pemangku kepentingan. 2. Mendorong penggunaan satu basis data pembangunan Papua sebagai dasar penentuan lokasi prioritas, target penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan evaluasi RAPPP. 3. Melakukan pemetaan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghindari duplikasi kegiatan. 4. Mendorong keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan agar RAPPP terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. 5. Memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan	

			5. Disepakati pemetaan dan sinkronisasi program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendukung RAPPP 2025–2029 untuk menghindari duplikasi. 6. BP3OKP diperkuat sebagai salah satu simpul koordinasi strategis dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua. 7. Berdasarkan hasil evaluasi, disepakati bersama KPK bahwa realisasi TKD Dana Otsus mulai Tahun 2027 akan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian pelaksanaan RAPPP 2025–2029. 8. Telah dibentuk Tim Terpadu Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Anggota BP3OKP, dan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan RAPPP 2025–2029 di Papua.	RAPPP serta menyusun indikator khusus untuk mengukur keberhasilan pembangunan OAP. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. 7. Menindaklanjuti pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan RAPPP melalui Tim Terpadu yang telah dibentuk.	
5	Audiensi pembahasan terkait berakhirnya Akreditasi BLUD RSUD Abepura pad abulan Mei 2027 maka direncakan untuk survei reakreditas pad bulan Desember 2026 dan permintaan vasilitas pemenuhan sarana alat kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia 11 Agustus 2026	Melaksanakan audiensi RSUD Abepura dengan BPP/BP3OKP untuk menyampaikan kondisi aktual rumah sakit, kesiapan menghadapi reakreditasi Desember 2026, serta kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi lintas pemerintah.	1. Kesiapan reakreditasi RSUD Abepura sekitar 67–70%, dengan kebutuhan dukungan sekitar Rp10 miliar untuk rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan menjelang Desember 2026. 2. Terdapat keterbatasan pembiayaan, dengan dukungan anggaran sekitar Rp19–19,9 miliar, sementara kebutuhan ideal operasional sekitar Rp60 miliar per tahun. 3. Diperlukan perhatian terhadap sarana, prasarana, dan alat kesehatan, termasuk ruang TBC tekanan negatif, ruang operasi, dan CT Scan. 4. Masih terdapat gap pembiayaan pelayanan BPJS terhadap sejumlah pelayanan yang tetap harus ditangani rumah sakit. 5. RSUD Abepura akan menyiapkan dokumen kebutuhan secara komprehensif sebagai dasar koordinasi lebih lanjut.	1. Mendorong pengamanan proses reakreditasi RSUD Abepura melalui pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan sarana prasarana. 2. Mendorong penguatan dukungan pembiayaan operasional dan pemenuhan alat kesehatan kritis. 3. Memfasilitasi pembahasan bersama BPJS dan pemerintah terkait untuk mencari alternatif penyelesaian gap pembiayaan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Papua. 4. BPP/BP3OKP menindaklanjuti dokumen kebutuhan RSUD Abepura melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, BPJS, dan pemangku kepentingan terkait.	

5	Bappernas_Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026. (Zoom) 24 Agustus 2026	Mengikuti rapat tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 dan penyelarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025–2029.	Diperoleh informasi terkait status penyelarasan usulan daerah, penyelesaian Berita Acara, serta daerah yang masih memerlukan perbaikan dan pendampingan lanjutan.	Mendorong pemerintah daerah yang belum selesai untuk segera melakukan perbaikan dan penyelesaian dokumen, serta BPP melakukan pemantauan tindak lanjut sesuai fungsi SHEK.	 
6	Kunjungan Kemenlu (10514/DM/08/2026/61) Menghadiri dan mengikuti pertemuan dengan Delegasi Kementerian Luar Negeri dalam rangka pembahasan perkembangan pembangunan Papua serta penguatan peran Papua dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik pada senin 24 Agustus 2026, di Swiss-Belhotel Jayapura. 24 Agustus 2026	Mengidentifikasi perkembangan dan tantangan pembangunan Papua serta membahas peluang penguatan peran Papua dalam kerja sama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.	Teridentifikasi isu strategis pembangunan Papua meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan dan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, ekonomi kreatif, serta pengembangan generasi muda. Selain itu, terpetakan potensi dan peluang kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik serta kebutuhan penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.	Memperkuat pembangunan SDM dan pendekatan pembangunan yang humanis dan berorientasi pada perdamaian, meningkatkan peran masyarakat asli Papua, serta mengembangkan potensi budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Mendorong kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, dan kepemudaan serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan.	

7	Audiensi dan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta perihal penanganan mahasiswa Program Profesi Dokter dan retaker yang menghadapi berakhirnya masa studi. 24 - 28 Agustus 2026	Mengoordinasikan percepatan peningkatan layanan kesehatan di Papua, khususnya terkait akses rujukan, penguatan SDM dokter spesialis, pembangunan dan kesiapan operasional fasilitas kesehatan, serta dukungan sarana dan prasarana.	1. Diperlukan percepatan pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, termasuk listrik, alkes, laboratorium, dan konektivitas, serta validasi kondisi fasilitas melalui pemantauan lapangan. 2. Tersedianya kuota dokter spesialis minimal 10 peserta per kabupaten, dengan biaya pendidikan ditanggung melalui dukungan Wakil Presiden, dan diperlukan finalisasi data serta persyaratan seleksi untuk ditindaklanjuti kepada Kementerian Kesehatan. 3. Teridentifikasi sejumlah kendala pembangunan dan operasional rumah sakit/puskesmas, antara lain akses geografis, proses tender, lokasi pembangunan, serta keterbatasan dukungan operasional. 4. Diperlukan penguatan koordinasi dan monitoring lintas pihak untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pembangunan, dan operasional fasilitas kesehatan berjalan sesuai kebutuhan daerah.	1. Mendorong koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pemenuhan sarana prasarana dan kesiapan operasional fasilitas kesehatan. 2. Mendorong finalisasi data calon dokter spesialis dan persyaratan seleksi untuk segera ditindaklanjuti kepada Kementerian Kesehatan sesuai kebutuhan daerah. 3. Memperkuat monitoring lapangan dan validasi data terkait kondisi sarana prasarana, progres pembangunan, serta kendala operasional sebagai bahan koordinasi dan pengambilan kebijakan. 4. Mendorong penguatan mekanisme rujukan dan dukungan transportasi kesehatan, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis. 5. Melakukan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut bersama pihak terkait sebagai bagian dari fungsi SHEK BPP/BP3OKP.	
8	Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Implementasi Dana Otonomi Khusus Papua serta Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 27 Agustus 2026	1. Mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya dalam tata kelola, perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus. 2. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan koordinasi antarinstansi melalui interoperabilitas sistem SIKD, SIPD, dan SIP3. 3. Mengidentifikasi kendala kelembagaan, pengelolaan dana Otsus, serta ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar perencanaan pembangunan. 4. Mendorong penguatan tata kelola Otsus menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.	1. Teridentifikasi masih adanya kendala dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus di daerah. 2. Ditekankan pentingnya interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta penguncian tahapan perencanaan untuk meningkatkan sinkronisasi dan disiplin anggaran. 3. Diperlukan penguatan kelembagaan DPRP, MRP, dan BP3OKP serta peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan Otsus. 4. Ditekankan pentingnya data OAP yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 5. Disepakati perlunya peningkatan transparansi melalui rekening khusus dana Otsus, pelabelan sumber pendanaan, serta pengawasan berbasis kinerja.	1. Memperkuat tata kelola dan pengawasan dana Otsus melalui perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. 2. Memastikan interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari mekanisme penyaluran dana Otsus. 3. Menyediakan dan menggunakan data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program Otsus. 4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait. 5. Mempercepat harmonisasi regulasi turunan Otsus serta meningkatkan transparansi penggunaan dana melalui rekening khusus dan labeling sumber pendanaan.	

KESIMPULAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT AGUSTUS 2026

Selama Agustus 2026, Pokja Papua Sehat BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, pendampingan, pemantauan, dan asistensi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Papua. Kegiatan mencakup penguatan tata kelola Otonomi Khusus, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta sinkronisasi program kesehatan dengan RAPPP Tahun 2025–2029.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan strategis, terutama keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, pembiayaan operasional, akses geografis, serta kebutuhan peningkatan dan pemerataan tenaga dokter spesialis. Kondisi RSUD Abepura, misalnya, menunjukkan perlunya dukungan rehabilitasi, pemenuhan alat kesehatan kritis, serta penguatan pembiayaan untuk menghadapi proses reakreditasi pada Desember 2026.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu perhatian utama melalui koordinasi terkait Program Profesi Dokter dan kebutuhan dokter spesialis di kabupaten/kota. Diperlukan finalisasi data calon peserta, pemenuhan persyaratan seleksi, serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi sesuai kondisi dan karakteristik wilayah Papua.

Dari sisi tata kelola, Pokja Papua Sehat juga mendorong integrasi perencanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan melalui penyelarasan RAPPP, penguatan basis data OAP, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penggunaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi penting sebagai dasar penentuan prioritas, target penerima manfaat, serta evaluasi pembangunan kesehatan Papua.

Selanjutnya, Pokja Papua Sehat perlu terus menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan mengawal tindak lanjut hasil koordinasi, memperkuat komunikasi lintas sektor, serta memastikan kebutuhan kesehatan daerah diterjemahkan ke dalam perencanaan dan kebijakan yang tepat sasaran. Fokus tindak lanjut diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan, validasi data, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua, khususnya OAP.

POKJA PAPUA POLHUKAM

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

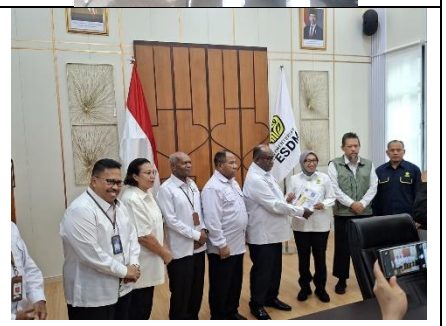
AGUSTUS 2026

Badan Pengarah Papua

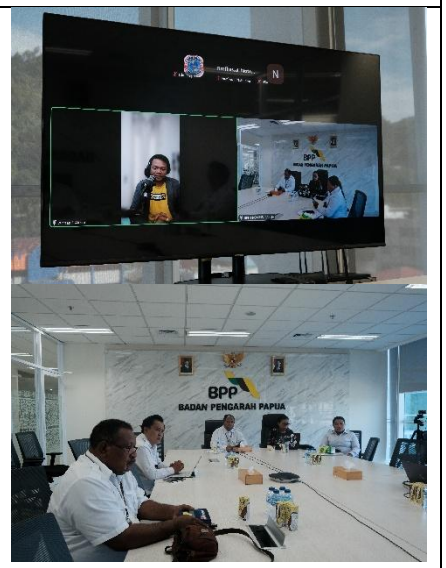
Perwakilan Provinsi Papua

Kegiatan Bulan Agustus 2026 Pokja Papua Polhukam Badan Pengarah Papua (BPP)/Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Mendampingi Anggota BPP Provinsi Papua pada kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi – Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Bersama Komisi. 2 – 4 Agustus 2026	Mendorong perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua yang lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terintegrasi, melalui penguatan regulasi, penyelarasan perencanaan, pemutakhiran data OAP, penguatan pengawasan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	1. Teridentifikasi kebutuhan penguatan tata kelola Dana Otsus Papua agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat ditelusuri dari tahap perencanaan hingga pelaporan. 2. Diperlukan percepatan penyusunan dan penetapan regulasi turunan mengenai Orang Asli Papua (OAP) serta penguatan basis data OAP yang valid dan terintegrasi. 3. Dibahas kebutuhan penerapan tagging Dana Otsus pada sistem perencanaan, penganggaran, dan pengadaan untuk memudahkan pemantauan penggunaan anggaran. 4. Disepakati pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP, dengan target keselarasan 100%. 5. Teridentifikasi perlunya penguatan pengawasan melalui kanal pengaduan masyarakat, penandaan fisik kegiatan yang dibiayai Dana Otsus, serta pengelolaan melalui rekening khusus. 6. Dibahas penguatan pemberdayaan pelaku usaha OAP melalui kemudahan akses NIB, NPWP, SPSE, dan e-katalog lokal. 7. Disepakati perlunya mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pembentukan Task Force/Gugus Tugas untuk mengawal implementasi komitmen bersama.	1. Mempercepat penetapan Perdasus OAP bagi daerah yang belum menyelesaikannya serta memastikan keseragaman definisi OAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mendorong Kemendagri menyusun regulasi/pedoman teknis terkait sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan Dana Otsus. 3. Mengembangkan sistem tagging Dana Otsus secara terintegrasi pada SIPD, SIKD-Otsus, SIPPP, SIRUP, dan SPSE. 4. Mendorong penyelarasan 100% dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. 5. Meningkatkan kualitas pendataan OAP melalui pembinaan Dukcapil dan pembangunan basis data sosial-ekonomi OAP yang terintegrasi. 6. Membentuk dan menetapkan Task Force/Gugus Tugas tingkat pusat dan daerah untuk memantau pelaksanaan komitmen serta memastikan pencapaian target sesuai *timeline*. 7. Memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat dan transparansi kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus. 8. Meningkatkan kapasitas SDM UKPBJ serta memfasilitasi pelaku usaha OAP agar dapat masuk dalam sistem pengadaan pemerintah. 9. Mendorong pemerintah daerah menetapkan mekanisme BAST saat mutasi pejabat untuk menjamin keberlanjutan data, dokumen, dan pengetahuan program.	 

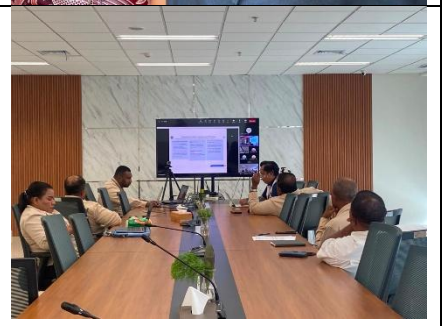
2	Pemantauan dan Koordinasi Penanganan Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. 5 Agustus 2026	Pada tanggal 5 Agustus 2026, dilaksanakan monitoring dan koordinasi untuk memastikan penanganan korban terindikasi keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, mengidentifikasi kebutuhan dan kendala di lapangan, serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.	Mempercepat investigasi dan pengujian sampel, memperkuat pengawasan keamanan pangan dan SOP penanganan kejadian, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, serta memperkuat komunikasi publik dan monitoring lanjutan terhadap pelaksanaan Program MBG.	Penanganan korban berjalan melalui koordinasi lintas sektor. Sekitar **65 pasien** telah ditangani di RSUD Yowari dan sebagian besar dalam kondisi stabil. Kebutuhan obat, ruang rawat, logistik, dan rujukan telah dikoordinasikan, sementara investigasi penyebab kejadian masih berlangsung.	  
3	Mendampingi Anggota BPP Provinsi Papua pada kegiatan Audiensi / koordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait Program Papua Terang. 5 Agustus 2026	Pada Rabu, 5 Agustus 2026, dilaksanakan audiensi Badan Pengarah Papua (BPP) dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) untuk membahas potensi dan kebutuhan penyediaan energi listrik serta pengembangan energi terbarukan di wilayah Papua.	1. BPP menawarkan untuk membantu mengawal program-program Kementerian ESDM di wilayah Papua sebagai perwakilan dari Setwapres. 2. Disampaikan potensi energi terbarukan di Papua, antara lain energi angin, pengolahan minyak jelantah, serta potensi pengembangan PLTA dengan memanfaatkan aliran air dari Danau Sentani dengan perkiraan kapasitas 12 MW. 3. Disampaikan masih terdapat kendala ketersediaan listrik yang berdampak pada pelayanan rumah sakit, operasional pabrik pengolahan sagu, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 4. Ditjen EBTKE menyampaikan terdapat 10.068 desa/dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik PLN dan ditargetkan selesai sampai tahun 2029. 5. Pada tahun 2026 dialokasikan pembangunan 39 unit PLTS terpadu yang mayoritas berada di wilayah Papua, serta direncanakan pembangunan 2 unit PLTMH di Papua pada tahun 2027. 6. Kementerian ESDM berkomitmen meningkatkan akses listrik, termasuk melalui	1. BPP akan menyampaikan usulan-usulan program penyediaan energi di wilayah Papua melalui Ditjen EBTKE. 2. Ditjen EBTKE akan melakukan survei ke lokasi pengolahan sagu di Sorong Selatan untuk melihat potensi energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. 3. BPP akan menyampaikan surat kepada Direktur Utama PLN untuk dapat menyediakan listrik 24 jam bagi rumah sakit di wilayah pelosok yang membutuhkan listrik untuk penggunaan peralatan kesehatan.	

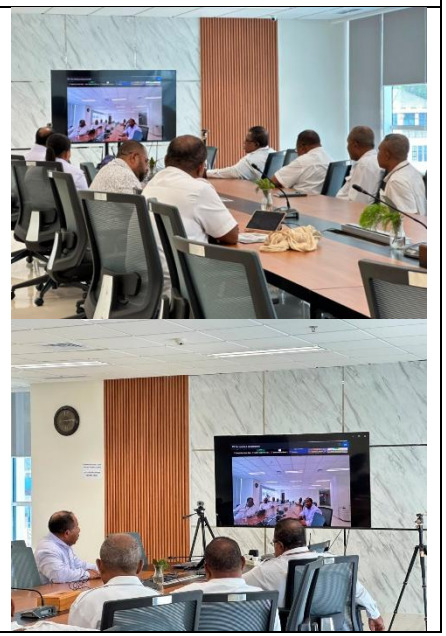
			pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.		
4	Mendampingi Anggota BPP Provinsi Papua pada kegiatan Audiensi guna mendiskusikan sinergi peran BPP dalam implementasi RAPPP, rencana Tim Implementasi RAPPP dan Pokja, serta penguatan Koordinasi BPP dengan Kementrian PPN/Bappernas. 5 Agustus 2026	Pada 27 Agustus 2026, dilaksanakan kegiatan Rencana Aksi dan Pemantauan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Papua untuk membahas implementasi komitmen bersama perbaikan tata kelola Dana Otsus, meliputi penguatan regulasi, penajaman sasaran OAP, penerapan *tagging* anggaran, penyelarasan dokumen perencanaan, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas lembaga.	1. Dibahas implementasi 19 poin komitmen bersama melalui matriks rencana aksi dengan target waktu pelaksanaan. 2. Ditekankan penguatan regulasi dan penerapan tagging Dana Otsus agar penggunaan dana dapat ditelusuri dari perencanaan hingga pelaporan. 3. Diperlukan percepatan regulasi dan pendataan OAP yang valid dan terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran Dana Otsus. 4. Disepakati target 100% penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. 5. Dibahas penguatan PBJ melalui pengembangan *tagging* sumber Dana Otsus pada SIRUP dan SPSE, peningkatan kompetensi SDM UKPBJ, serta pemberdayaan pelaku usaha OAP. 6. Disepakati pembentukan Task Force/Gugus Tugas tingkat pusat dan daerah untuk mengawal implementasi rencana aksi. 7. Dibahas penguatan mekanisme pengaduan masyarakat serta kebijakan BAST untuk menjamin kesinambungan data, dokumen, dan pengetahuan dalam pergantian pejabat.	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan Perdasus OAP bagi daerah yang belum menetapkan. 2. Menyusun regulasi terkait sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan Dana Otsus. 3. Mendorong penerapan tagging Dana Otsus secara sistemik pada SIPD, SIKD-Otsus, SIPPP, SIRUP, dan SPSE. 4. Meningkatkan kualitas dan validitas pendataan OAP melalui pembinaan Dukcapil. 5. Mendorong penyelarasan 100% dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP. 6. Membentuk dan menetapkan SK Task Force/Gugus Tugas tingkat pusat yang mengintegrasikan peran kementerian/lembaga ke dalam struktur BP3OKP. 7. Memperkuat kapasitas SDM UKPBJ dan memfasilitasi pelaku usaha OAP untuk memperoleh NIB, NPWP, serta integrasi akun ke SPSE dan e-katalog lokal. 8. Mendorong pemerintah daerah membentuk kanal pengaduan masyarakat serta menerapkan BAST yang komprehensif dalam setiap mutasi pegawai.	 
5	Anggota Pokja Papua Sehat dan Polhukam Perwakilan Provinsi Papua Mewakili Anggota BPP Provinsi Papua Melakukan Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 20252029 untuk memperkuat komitmen bersama, menyelaraskan arah kebijakan dan langkah implementasi, serta menghimpun masukan strategis guna mendukung	Pada 10 Agustus 2026, mengikuti Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 untuk memperkuat komitmen bersama, menyelaraskan arah kebijakan dan langkah implementasi, serta menghimpun masukan strategis guna mendukung pelaksanaan RAPPP 2025–2029 secara lebih efektif.	1. Ditekankan pentingnya sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BP3OKP, MRP, OAP, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam implementasi RAPPP 2025–2029. 2. Ditetapkan bidang prioritas pembangunan Papua meliputi SDM, konektivitas dan infrastruktur, ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan dan pemberdayaan OAP. 3. Diperlukan penguatan integrasi data pembangunan Papua, termasuk data OAP, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, serta program pemerintah pusat dan daerah. 4. Disepakati monitoring dan evaluasi RAPPP secara berkala yang tidak hanya mengukur serapan anggaran, tetapi juga output, outcome,	1. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BP3OKP, dan pemangku kepentingan. 2. Mendorong penggunaan satu basis data pembangunan Papua sebagai dasar penentuan lokasi prioritas, target penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan evaluasi RAPPP. 3. Melakukan pemetaan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghindari duplikasi kegiatan. 4. Mendorong keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan agar	

	pelaksanaan RAPPP Tahun 2025–2029 secara lebih efektif. 10 Agustus 2026		manfaat masyarakat, dampak terhadap OAP, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan dasar. 5. Disepakati pemetaan dan sinkronisasi program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendukung RAPPP 2025–2029 untuk menghindari duplikasi. 6. BP3OKP diperkuat sebagai salah satu simpul koordinasi strategis dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua. 7. Berdasarkan hasil evaluasi, disepakati bersama KPK bahwa realisasi TKD Dana Otsus mulai Tahun 2027 akan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian pelaksanaan RAPPP 2025–2029. 8. Telah dibentuk Tim Terpadu Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Anggota BP3OKP, dan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan RAPPP 2025–2029 di Papua.	RAPPP terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. 5. Memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan RAPPP serta menyusun indikator khusus untuk mengukur keberhasilan pembangunan OAP. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. 7. Menindaklanjuti pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan RAPPP melalui Tim Terpadu yang telah dibentuk.	
6	Zoom_(Podcast MPSI Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua. 10 Agustus 2026	Pada 10 Agustus 2026, dilaksanakan Podcast/Wawancara MPSI bertema “Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua” untuk membahas arah pembangunan Papua dalam kerangka Otonomi Khusus, tantangan pembangunan, potensi ekonomi dan sumber daya alam, hak ulayat, pembangunan OAP, peran BPP, serta arah pembangunan menuju Papua Emas 2041.	1. Papua memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, masyarakat adat, generasi muda, dana pembangunan, dan kelembagaan sosial yang dapat menjadi modal pembangunan. 2. Tantangan pembangunan meliputi kondisi geografis dan infrastruktur, kesejahteraan OAP, kesehatan, keamanan, kapasitas SDM, serta keterbatasan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya ekonominya. 3. Masyarakat adat, klan, dan marga perlu ditempatkan sebagai subjek dan pelaku utama pembangunan, termasuk dalam pengelolaan potensi sumber daya dan kegiatan ekonomi. 4. Diperlukan pembangunan yang kontekstual, partisipatif, dan bottom-up, dengan memperhatikan karakteristik geografis, adat, budaya, agama, dan kondisi sosial masyarakat Papua. 5. Empat pilar Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai perlu dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan OAP.	1. Mendorong pemetaan potensi ekonomi berbasis wilayah adat/klan/marga, termasuk tanah, komoditas unggulan, SDM, kelembagaan ekonomi, dan peluang pasar. 2. Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat adat melalui koperasi, CV, atau PT serta model kemitraan investasi yang melindungi hak ulayat. 3. Mengembangkan gerakan “Sarjana Pulang Kampung” untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi kampung. 4. Mendorong transformasi ekonomi OAP dari ekonomi subsisten menuju usaha produktif dan bernilai tambah. 5. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat serta keterpaduan empat pilar pembangunan Papua. 6. Memperkuat pendekatan damai dan lokalisasi isu agar persoalan pada wilayah tertentu tidak menimbulkan generalisasi terhadap seluruh Papua.	

7	DPRK_Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Tanah Nimboran. 11 Agustus 2026	Pada 11 Agustus 2026, dilaksanakan rapat koordinasi BPP dengan DPRK Jayapura untuk menindaklanjuti permasalahan tanah adat di Distrik Nimbokrang, mengidentifikasi kendala penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi, serta mendorong koordinasi lintas pihak.	1. Permasalahan tanah di Distrik Nimbokrang telah dibahas sejak tahun 2014 dan hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang final dan dapat diterima seluruh pihak. 2. Terdapat perbedaan pandangan mengenai status dan batas wilayah tanah antara masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi. 3. Upaya penyelesaian sebelumnya melalui UP4B belum memberikan penyelesaian final. 4. Diperlukan penelusuran data dan dokumen terkait dasar penetapan kawasan transmigrasi, status dan riwayat tanah, serta hasil penanganan sebelumnya. 5. DPRK Jayapura meminta BPP melakukan sosialisasi RIPPP dan RAPPP sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna.	1. Meminta data dan dokumen kepada kementerian/lembaga serta instansi terkait sebagai dasar penelusuran dan penyelesaian permasalahan. 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRK Jayapura. 3. Melaksanakan verifikasi lapangan dan konfirmasi kepada kedua pihak untuk memperoleh gambaran yang berimbang. 4. Mendorong kedua pihak menahan diri guna mencegah eskalasi selama proses penelusuran berlangsung. 5. Menyelenggarakan sosialisasi RIPPP dan RAPPP kepada DPRK Jayapura sebelum Rapat Paripurna.	 
8	DPRK Jayapura_Pansus Otsus DPRK Jayapura_Koordinasi mengenai kebijakan, perencanaanm pengalokasia, pelaksanaan, serta Evaluasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS). 12 Agustus 2026	Pada 12 Agustus 2026, dilaksanakan rapat koordinasi BPP/BP3OKP dengan Pansus Otsus DPRK Jayapura untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus, khususnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Dana Otsus agar transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua.	1. Disepakati penguatan pengawasan Dana Otsus pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan memastikan keberpihakan kepada OAP. 2. Ditekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan dan partisipatif, termasuk keterlibatan masyarakat sejak tingkat kampung dan distrik. 3. Diperlukan keterbukaan dan keterlacakan data Dana Otsus dari sumber anggaran, program, lokasi, penerima manfaat OAP, keluaran, hasil, hingga dampak. 4. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pengawasan, termasuk validitas data OAP, pembayaran iuran JKN, kapasitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta keamanan pangan. 5. Diperlukan penguatan kebijakan afirmasi dan pemberdayaan pengusaha OAP sesuai Perda Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2024. 6. BPP/BP3OKP dan Pansus Otsus DPRK Jayapura berkomitmen memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Dana Otsus secara berkelanjutan.	1. Memperkuat pelaksanaan Musrenbang Otsus dan memastikan usulan masyarakat dapat ditelusuri hingga menjadi program daerah. 2. Menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP serta memastikan penerima manfaat OAP ditetapkan sejak tahap perencanaan. 3. Memutakhirkan dan mengintegrasikan basis data OAP serta menyediakan data Dana Otsus yang dapat ditelusuri dan dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah daerah. 4. Memperkuat pengawasan bidang kesehatan melalui verifikasi pembayaran JKN, evaluasi kapasitas fasilitas rujukan, kebutuhan tenaga kesehatan, dan pengawasan keamanan pangan lintas sektor. 5. Memvalidasi data sekolah, guru, peserta didik, serta sarana prasarana sebagai dasar kebijakan dan penganggaran. 6. Menindaklanjuti Perda Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2024 melalui aturan pelaksana dan mekanisme verifikasi pengusaha OAP. 7. Menyelenggarakan penyampaian materi RIPPP, RAPPP, dan ketentuan	 

				pengelolaan Dana Otsus kepada DPRK Jayapura serta membangun koordinasi berkelanjutan antarlembaga.	
9	Pertemuan dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri_rangka pembahasan isu data dan administrasi pengungsi masyarakat Papua di Papua Nugini (PNG). ST-96/SETBPP/JYP/2026. 12 - 13 Agustus 2026	Pada 12 Agustus 2026, dilaksanakan koordinasi teknis untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pendataan dan perekaman kependudukan bagi warga Papua yang kembali ke NKRI, mengidentifikasi mekanisme verifikasi kewarganegaraan, tantangan pendataan OAP, serta kebutuhan koordinasi dan dukungan teknis di wilayah perbatasan Papua.	1. Pendataan warga Papua yang kembali dari luar negeri memerlukan alur koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Imigrasi, Dukcapil, Kemlu, BNPP, sektor Polhukam, BPP, dan pemerintah daerah. 2. Verifikasi status kewarganegaraan oleh Imigrasi menjadi tahapan sebelum proses entry dan perekaman oleh Dukcapil. 3. Perekaman dilakukan melalui pendataan manual, input sistem, serta biometrik berupa sidik jari dan iris mata untuk meminimalkan duplikasi data. 4. Verifikasi status OAP masih menghadapi tantangan, khususnya dalam membedakan OAP dengan warga yang lahir di Papua tetapi bukan OAP. 5. Ditjen Dukcapil dapat memberikan dukungan perekaman jemput bola menggunakan perangkat mobile, termasuk melalui PLBN Sota, Skouw, dan Yetetkun.	1. Menyusun alur koordinasi lintas lembaga dalam pendataan warga Papua yang kembali dari PNG. 2. Melakukan koordinasi lanjutan dengan Ditjen Dukcapil untuk memperoleh dukungan teknis perekaman. 3. Mengumpulkan dan menata data manual warga Papua yang kembali dari PNG sebagai bahan verifikasi dan perekaman. 4. Memanfaatkan PLBN Sota, PLBN Skouw, dan PLBN Yetetkun sebagai titik pendukung pelaksanaan perekaman. 5. Menyusun surat koordinasi resmi BPP kepada instansi terkait sebagai dasar audiensi dan koordinasi teknis lebih lanjut.	
10	Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, DKI Jakartaa_Dalam rangka pembahasan isu data dan administrasi pengungsi masyarakat Papua di Papua Nugini (PNG)_Pak Bernadicto. ST-96/SETBPP/JYP/2026. 14 Agustus 2026	Pada 14 Agustus 2026, dilaksanakan koordinasi dengan BNPP untuk membahas inisiatif pemulangan pengungsi asal Indonesia di Papua Nugini (PNG), memetakan kewenangan institusional, mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait, serta menentukan langkah prosedural untuk pelaksanaan audiensi resmi lintas sektoral.	1. Isu pemulangan pengungsi Papua dari PNG dinilai kompleks dan memerlukan pendekatan multisektor karena melibatkan berbagai kewenangan kementerian/lembaga. 2. Unit Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP diidentifikasi sebagai unit yang relevan karena berkaitan dengan lalu lintas manusia di perbatasan dan pengelolaan PLBN. 3. Kementerian Luar Negeri dipandang memiliki peran penting sebagai leading sector dalam urusan pengungsi dan perundingan perbatasan, sedangkan Kemenko Polhukam berperan dalam koordinasi isu terkait di tingkat pusat. 4. Audiensi resmi dengan BNPP perlu ditujukan kepada Sekretaris BNPP agar dapat didisposisikan kepada unit teknis terkait, khususnya Direktorat Tasbara dan Direktorat Batas Darat. 5. Audiensi disepakati lebih efektif dilaksanakan secara tatap muka dengan penyampaian bahan pendukung yang menjelaskan agenda dan tujuan pembahasan.	1. Menyusun dan mengirimkan surat permohonan audiensi resmi kepada Sekretaris BNPP. 2. Melampirkan bahan pendukung dalam bentuk fisik dan PDF mengenai agenda dan tujuan audiensi terkait pemulangan pengungsi. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan audiensi tatap muka setelah surat diterima dan diproses oleh BNPP. 4. Mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan isu pemulangan pengungsi Papua dari PNG.	
11	ST-54/BPP-P/JYP/2026 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam rangka pembahasan isu data dan administrasi pengungsi masyarakat	Pada 14 Agustus 2026, dilaksanakan Pulbaket dengan Diplomat Ahli Madya Direktorat Pasifik dan Oseania untuk memperoleh analisis mengenai rencana repatriasi warga asal Papua	1. Repatriasi massal saat ini dinilai tidak layak dan berisiko tinggi, karena dapat menimbulkan konflik horizontal, kecemburuan sosial, dan persoalan administrasi serta kewarganegaraan. 2. Belum tersedia data pengungsi yang valid dan terverifikasi secara “by name, by address”, serta	1. Tidak mendorong repatriasi massal pengungsi Papua dari PNG dalam kondisi saat ini. 2. Melakukan verifikasi faktual/joint verification untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan,	

	Papua di Papua Nugini (PNG) _ . ST-96/SETBPP/JYP/2026. 14 Agustus 2026	yang telah lama bermukim di PNG, meliputi aspek historis, data populasi, kewarganegaraan, sosial, keamanan, serta risiko konflik horizontal.	terdapat kompleksitas status kewarganegaraan generasi kedua dan ketiga. 3. Repatriasi berpotensi menimbulkan persoalan kesiapan lahan, hunian, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan penerimaan sosial. 4. Belum terdapat komplain atau permintaan resmi dari Pemerintah PNG terkait keberadaan komunitas pengungsi tersebut. 5. Jika dilakukan pemulangan, perlu dilakukan secara bertahap dan selektif, berdasarkan permintaan individu/keluarga yang terverifikasi dan kesiapan penerimaan di Indonesia.	dan jumlah warga yang benar-benar ingin kembali. 3. Pemulangan dilakukan secara selektif dan bertahap, berdasarkan permintaan individu/keluarga serta kesiapan sosial-administratif. 4. Melakukan kajian cost-benefit secara mendalam dengan memperhatikan kesiapan lahan, layanan dasar, pekerjaan, penerimaan masyarakat, serta potensi konflik horizontal. 5. Mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kebijakan repatriasi tidak menimbulkan persoalan sosial dan keamanan baru.	
12	Mengikuti Zoom Lokakarya Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II TA 2026 dan Workshop Penyusunan RAP Awal Dana Otsus Papua TA 2027 melalui Aplikasi Interoperabilitas (Batch 2). 18 – 22 Agustus 2026	Mengikuti lokakarya untuk memperoleh pemahaman mengenai percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026, pengelolaan SiLPA, serta mekanisme penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus.	Mengikuti lokakarya untuk memperoleh pemahaman mengenai percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026, pengelolaan SiLPA, serta mekanisme penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus.	1. Mendorong pemerintah daerah untuk segera memenuhi dan melengkapi dokumen persyaratan salur Dana Otsus dan DTI Tahap II TA 2026 sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi antar-OPD, Bappeda/Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat dalam memastikan kesesuaian data realisasi, capaian keluaran, dan dokumen pendukung. 3. Mendorong pemanfaatan interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus secara optimal untuk mendukung penyusunan RAP Awal TA 2027 yang lebih akurat, sinkron, dan sesuai dengan prioritas pembangunan Papua.	
13	Rapat Koordinasi Program Sekolah Rakyat 20 Agustus 2026	Melaksanakan rapat koordinasi pada 20 Agustus 2026 bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan Program Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor, termasuk kendala pelaksanaan serta keterlibatan Subkontraktor OAP.	1. Realisasi fisik pembangunan Program Sekolah Rakyat per 20 Agustus 2026 mencapai 28,50% di Kota Jayapura, 21,75% di Kabupaten Biak Numfor, dan 12,40% di Kabupaten Sarmi. 2. Pelaksanaan pembangunan masih menghadapi kendala geografis, logistik dan transportasi, ketersediaan material lokal, serta kondisi cuaca. 3. Sebanyak 14 Subkontraktor OAP telah dilibatkan, terdiri atas 6 di Kota Jayapura, 5 di Biak Numfor, dan 3 di Sarmi.	1. Mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada lokasi yang menjadi titik peninjauan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden RI ke Jayapura. 2. Menyiapkan fact sheet dan maket visual sebagai bahan informasi perkembangan Program Sekolah Rakyat. 3. Mendorong penyelesaian pembayaran termin Subkontraktor OAP guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kondisi sosial di lapangan.	

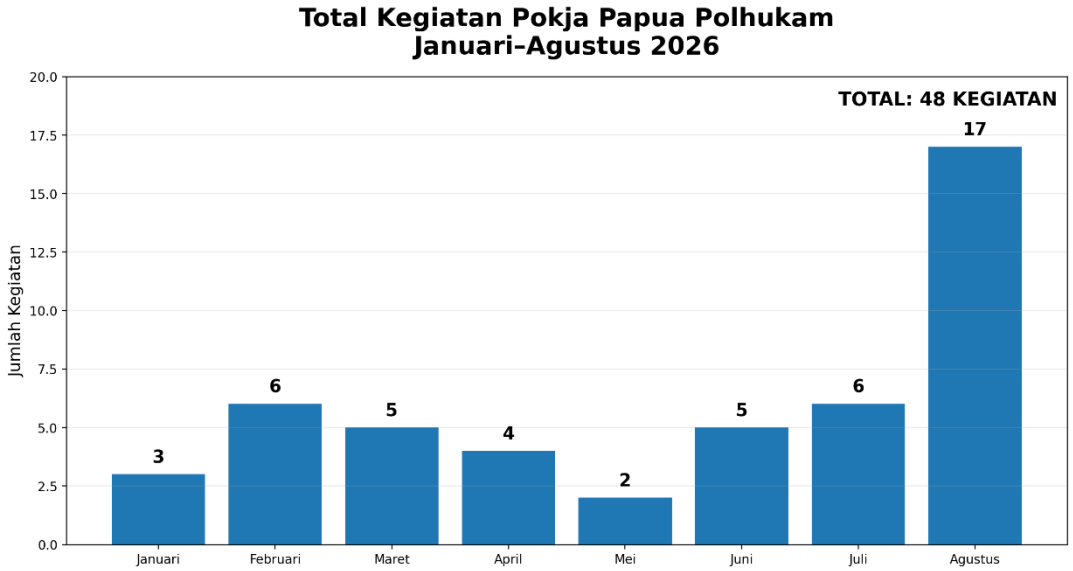
14	Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026 Bappernas. 20 – 21 Agustus 2026	Melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan dengan RAPPP Tahun 2025–2029.	Telah dilakukan pembahasan, pendampingan, dan asistensi terhadap usulan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, serta kabupaten/kota di wilayah sasaran, termasuk penajaman program pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penguatan Papua Cerdas.	Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil pendampingan dengan menyempurnakan usulan program dan kegiatan, menyesuaikannya dengan RAPPP Tahun 2025–2029, serta memperjelas indikator dan target kinerja, khususnya pada program pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.	
15	Bappernas_Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026. (Zoom) 24 Agustus 2026	Mengikuti rapat tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 dan penyelarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025–2029.	Diperoleh informasi terkait status penyelarasan usulan daerah, penyelesaian Berita Acara, serta daerah yang masih memerlukan perbaikan dan pendampingan lanjutan.	Mendorong pemerintah daerah yang belum selesai untuk segera melakukan perbaikan dan penyelesaian dokumen, serta BPP melakukan pemantauan tindak lanjut sesuai fungsi SHEK.	

15	Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Implementasi Dana Otonomi Khusus Papua serta Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 27 Agustus 2026	1. Mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya dalam tata kelola, perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus. 2. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan koordinasi antarinstansi melalui interoperabilitas sistem SIKD, SIPD, dan SIP3. 3. Mengidentifikasi kendala kelembagaan, pengelolaan dana Otsus, serta ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar perencanaan pembangunan. 4. Mendorong penguatan tata kelola Otsus menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.	1. Teridentifikasi masih adanya kendala dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus di daerah. 2. Ditekankan pentingnya interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta penguncian tahapan perencanaan untuk meningkatkan sinkronisasi dan disiplin anggaran. 3. Diperlukan penguatan kelembagaan DPRP, MRP, dan BP3OKP serta peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan Otsus. 4. Ditekankan pentingnya data OAP yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 5. Disepakati perlunya peningkatan transparansi melalui rekening khusus dana Otsus, pelabelan sumber pendanaan, serta pengawasan berbasis kinerja.	1. Memperkuat tata kelola dan pengawasan dana Otsus melalui perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. 2. Memastikan interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari mekanisme penyaluran dana Otsus. 3. Menyediakan dan menggunakan data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program Otsus. 4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait. 5. Mempercepat harmonisasi regulasi turunan Otsus serta meningkatkan transparansi penggunaan dana melalui rekening khusus dan labeling sumber pendanaan.	 
16	Verifikasi dan Penyelarasan terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. 27 Agustus 2026	Melakukan verifikasi dan penyelarasan program kerja Pokja Papua Cerdas dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, termasuk indikator, target, dan pendanaan.	Program dan kegiatan Pokja Papua Cerdas telah diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua. Terdapat kesepahaman mengenai indikator dan target kinerja agar program lebih tepat sasaran serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.	Melanjutkan koordinasi antara Pokja Papua Cerdas dan BAPPERIDA Provinsi Papua untuk mengawal hasil verifikasi dan penyelarasan hingga tahap penganggaran dan penetapan dokumen akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.	
17	Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Kabupaten Jayapura bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 28 Agustus 2026	Memperkuat pemahaman dan kapasitas DPRK jalur pengangkatan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak, serta kewenangannya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, sekaligus membahas berbagai kendala kelembagaan, politik, dan pengawasan dana Otsus.	Terdapat penegasan bahwa DPRK jalur pengangkatan memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan anggota DPRK hasil pemilu. Rapat juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, termasuk keterbatasan akses informasi anggaran, dominasi politik, belum optimalnya sekretariat kelompok khusus, serta pengawasan dana Otsus. BPP menyatakan kesiapan menjadi jembatan koordinasi antara DPRK dan pemerintah pusat.	Memperkuat peran dan kedudukan DPRK jalur pengangkatan melalui penyempurnaan Tata Tertib, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan tenaga ahli, penguatan koordinasi dengan BPP dan Kemendagri, serta peningkatan transparansi dan pengawasan pengelolaan dana Otsus.	

No.	Isu Strategis	Perkembangan Agustus 2026	Posisi BPP/Pokja	Tindak Lanjut
1	Tata Kelola Dana Otsus	Ditemukan kebutuhan penguatan perencanaan, tagging, transparansi, data OAP, dan pengawasan Dana Otsus.	Koordinasi dan pengawalan lintas K/L dan Pemda	Memantau implementasi komitmen perbaikan tata kelola dan penyelarasan RAPPP
2	Perlindungan Hak OAP dan Tanah Adat	Permasalahan tanah adat masih memerlukan verifikasi data, koordinasi lintas pihak, dan penyelesaian yang berkeadilan.	Fasilitator dialog dan penghubung antarpihak	Verifikasi dokumen, koordinasi Pemda/MRP/DPRK/KL terkait, dan pemantauan penyelesaian
3	Pengungsi Papua dari PNG	Ditemukan kompleksitas data, status kewarganegaraan, kesiapan penerimaan, serta risiko sosial apabila dilakukan repatriasi massal.	Koordinator awal lintas instansi	Verifikasi data dan status kewarganegaraan serta penyusunan mekanisme pemulangan secara selektif
4	Kelembagaan Otsus	Masih diperlukan penguatan kapasitas dan koordinasi DPRK jalur pengangkatan serta sinergi DPRP, MRP, BPP dan Pemda.	Penghubung pemerintah pusat–daerah	Penguatan kapasitas, koordinasi kelembagaan, dan pengawalan pelaksanaan fungsi
5	Stabilitas dan Keamanan Pembangunan	Isu keamanan mulai diposisikan sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan dan implementasi Otsus.	Penguatan koordinasi dengan aparat dan pemangku kepentingan	Mendorong pendekatan keamanan yang terintegrasi dengan pembangunan dan kesejahteraan

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Polhukam selama Agustus 2026 menunjukkan penguatan peran BPP dalam mengawal isu politik, hukum, dan keamanan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Papua. Fokus kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat sektoral, tetapi mulai mengarah pada penguatan tata kelola Otsus, perlindungan hak masyarakat adat dan OAP, penguatan kelembagaan, penanganan isu perbatasan dan pengungsi Papua dari PNG, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan tindak lanjut lintas sektor, khususnya terkait validitas data OAP, penyelesaian permasalahan tanah adat, transparansi dan akuntabilitas Dana Otsus, penguatan kelembagaan Otsus, serta penanganan isu Papua–PNG secara hati-hati dan terukur. Dalam hal ini, BPP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) perlu terus mengawal kesinambungan hasil koordinasi agar rekomendasi yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi langkah kebijakan dan penyelesaian konkret di lapangan.



Sepanjang Januari–Agustus 2026, Pokja Papua Polhukam melaksanakan 48 kegiatan dengan peningkatan aktivitas yang signifikan pada Agustus. Tren ini menunjukkan semakin intensifnya peran Polhukam dalam mengawal tata kelola Otsus, penyelesaian isu strategis, dan penguatan koordinasi lintas sektor

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

MONTHLY REPORT
POKJA PAPUA POLHUKAM

AGUSTUS 2026

SINERGI, KOLABORASI, AKSELERASI
untuk Papua Maju, Mandiri, dan Sejahtera

TENTANG BPP

BPP melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan di Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan.

17 KEGIATAN STRATEGIS
Dilaksanakan

18 HARI AKTIVITAS
1 – 20 Agustus 2026

15+ PIHAK TERLIBAT
Instansi & Mitra

70+ HASIL & REKOMENDASI
Tindak Lanjut

RINGKASAN KEGIATAN STRATEGIS AGUSTUS 2026

1 Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua bersama KPK

2 – 4 Agustus 2026



- Pembahasan penguatan tata kelola Dana Otsus Papua.
- Identifikasi kebutuhan regulasi OAP, tagging Dana Otsus, pengawasan, dan sinergi lintas lembaga.
- Disepakati pembentukan Task Force/Gugus Tugas.

REKOMENDASI
Percepatan regulasi OAP, penguatan data OAP, tagging Dana Otsus, dan pembentukan Task Force.

2 Pemantauan dan Koordinasi Penanganan Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kab. Jayapura

5 Agustus 2026



- Monitoring penanganan korban dugaan keracunan Program MBG.
- Koordinasi lintas sektor kesehatan, logistik, laboratorium, dan komunikasi publik.
- 65 pasien telah ditangani, sebagian besar dalam kondisi stabil.

REKOMENDASI
Perkuat pengawasan keamanan pangan, SOP penanganan, komunikasi publik, serta monitoring lanjutan Program MBG.

3 Audiensi/Koordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait Program Papua Terang

5 Agustus 2026



- Pembahasan percepatan elektrifikasi di wilayah Papua melalui Program Papua Terang.
- Identifikasi kendala jaringan, perizinan, dan dukungan pemerintah daerah.
- ESDM berkomitmen memperluas akses listrik dan pendanaan.

REKOMENDASI
Percepat pembangunan infrastruktur listrik dan sinergi pusat–daerah untuk perluasan Program Papua Terang.

4 Koordinasi dengan BNPP terkait Pemulangan WNI dari Papua Nugini

14 Agustus 2026



- Pembahasan rencana pemulangan WNI dari Papua Nugini secara aman dan bertahap.
- Koordinasi mekanisme pendataan, dokumen, transportasi, dan perlindungan.
- BNPP menyiapkan dukungan teknis dan fasilitasi lintas instansi.

REKOMENDASI
Perkuat pendataan, koordinasi lintas instansi, dan penyediaan layanan pasca kepulangan bagi para WNI.

5 Rapat Koordinasi Program Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Kab. Sarmi dan Kab. Biak Numfor

14 Agustus 2026



- Pembahasan rencana implementasi Program Sekolah Rakyat.
- Sinergi lokasi, sarpras, SDM, kurikulum, dan pembiayaan.
- Komitmen percepatan pembangunan dan operasional sekolah.

REKOMENDASI
Percepat penyediaan sarpras, rekrutmen SDM, sinergi pembiayaan, dan monitoring berkala program.

6 Koordinasi Pansus Otsus DPRK Jayapura dan Tindak Lanjut Permasalahan Tanah Nimboran

11 – 12 Agustus 2026



- Pembahasan tindak lanjut permasalahan tanah Nimboran.
- Koordinasi data, legalitas, dan langkah penyelesaian.
- Disepakati tindak lanjut bersama pemerintah daerah.

REKOMENDASI
Percepat verifikasi data, penyelesaian legalitas, dan mediasi dengan para pihak.

CAPAIAN AGUSTUS 2026

- Seluruh kegiatan strategis berjalan sesuai rencana.
- Terjalin koordinasi dengan 15+ instansi dan mitra.
- Tercapai 20+ hasil dan rekomendasi strategis.
- Penguatan tata kelola Dana Otsus Papua terus didorong melalui komitmen bersama.
- Respon cepat penanganan dugaan keracunan MBG dan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

KOMITMEN KAMI

- Bersinergi dan berkolaborasi untuk Papua aman, damai, dan sejahtera.
- Mengawal implementasi kebijakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).
- Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

TINDAK LANJUT

- Melanjutkan koordinasi lintas sektor terkait seluruh rekomendasi kegiatan.
- Mengawal tindak lanjut kebijakan afirmatif bagi OAP dan program prioritas Papua.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap rekomendasi di setiap kegiatan strategis.

NILAI KAMI

SINERGI Bersama untuk Papua

KOLABORASI Bergerak dalam Aksi Nyata

INTEGRITAS Bekerja dengan Amanah

INOVASI Melahirkan Solusi Berkelanjutan

KESIMPULAN KEGIATAN POKJA PAPUA POLHUKAM AGUSTUS 2026

Selama Agustus 2026, Pokja Papua Polhukam BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan terkait tata kelola Otonomi Khusus, pengawasan Dana Otsus, penyelesaian permasalahan pertanahan, isu administrasi dan pemulangan masyarakat Papua dari PNG, serta penguatan peran kelembagaan Otsus.

Hasil kegiatan menunjukkan masih diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan dengan RIPPP/RAPPP, peningkatan kualitas dan integrasi data OAP, serta penguatan transparansi dan pengawasan Dana Otsus. Dalam aspek Polhukam, penanganan isu strategis seperti pertanahan dan pemulangan masyarakat Papua dari PNG perlu dilakukan secara terukur, bertahap, berbasis data, dan memperhatikan aspek sosial serta keamanan.

Selanjutnya, Pokja Papua Polhukam perlu terus menjalankan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan mengawal tindak lanjut hasil koordinasi kepada instansi yang memiliki kewenangan, tanpa mengambil alih kewenangan pelaksana teknis.

POKJA PAPUA PRODUKTIF

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

AGUSTUS 2026

Badan Pengarah Papua

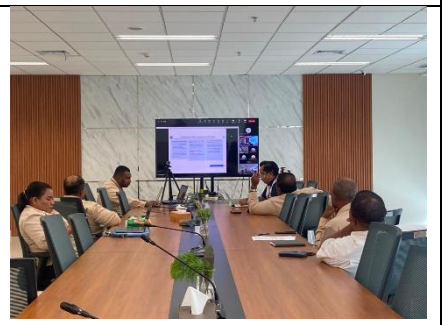
Perwakilan Provinsi Papua

Kegiatan Bulan Agustus 2026 Pokja Papua Produktif Badan Pengarah Papua (BPP)/Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Pertemuan Pokja Papua Produktif, APKASINDO, Koperasi OMP dengan Dinas Pertanian Kabupaten Keerom 3 Agustus 2026	Peng-imputan data Petani dan data lahan petani.	Pertemuan Pokja Papua Produktif, Apkasinsindo dan Koperasi OMP. Pada Tgl 3 Agust. 2026 dng Kepala Dinas Pertanian Kab. Keerom.	1. Kesepakatan utk mempercepat PSR di Kab. Keerom. 2. Peng-imputan data petani dan lahan pertani segera dipercepat. 3. Adminstrasi Koperasi Koperasi OMP agar dipersiap.	
2	Pemantauan dan Koordinasi Penanganan Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. 5 Agustus 2026	Pada tanggal 5 Agustus 2026, dilaksanakan monitoring dan koordinasi untuk memastikan penanganan korban terindikasi keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, mengidentifikasi kebutuhan dan kendala di lapangan, serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.	Mempercepat investigasi dan pengujian sampel, memperkuat pengawasan keamanan pangan dan SOP penanganan kejadian, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, serta memperkuat komunikasi publik dan monitoring lanjutan terhadap pelaksanaan Program MBG.	Penanganan korban berjalan melalui koordinasi lintas sektor. Sekitar **65 pasien** telah ditangani di RSUD Yowari dan sebagian besar dalam kondisi stabil. Kebutuhan obat, ruang rawat, logistik, dan rujukan telah dikoordinasikan, sementara investigasi penyebab kejadian masih berlangsung.	

3	Zoom_(Podcast MPSI Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua. 10 Agustus 2026	Pada 10 Agustus 2026, dilaksanakan Podcast/Wawancara MPSI bertema “Tantangan dan Potensi Pembangunan Papua” untuk membahas arah pembangunan Papua dalam kerangka Otonomi Khusus, tantangan pembangunan, potensi ekonomi dan sumber daya alam, hak ulayat, pembangunan OAP, peran BPP, serta arah pembangunan menuju Papua Emas 2041.	1. Papua memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, masyarakat adat, generasi muda, dana pembangunan, dan kelembagaan sosial yang dapat menjadi modal pembangunan. 2. Tantangan pembangunan meliputi kondisi geografis dan infrastruktur, kesejahteraan OAP, kesehatan, keamanan, kapasitas SDM, serta keterbatasan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya ekonominya. 3. Masyarakat adat, klan, dan marga perlu ditempatkan sebagai subjek dan pelaku utama pembangunan, termasuk dalam pengelolaan potensi sumber daya dan kegiatan ekonomi. 4. Diperlukan pembangunan yang kontekstual, partisipatif, dan bottom-up, dengan memperhatikan karakteristik geografis, adat, budaya, agama, dan kondisi sosial masyarakat Papua. 5. Empat pilar Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai perlu dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan OAP.	1. Mendorong pemetaan potensi ekonomi berbasis wilayah adat/klan/marga, termasuk tanah, komoditas unggulan, SDM, kelembagaan ekonomi, dan peluang pasar. 2. Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat adat melalui koperasi, CV, atau PT serta model kemitraan investasi yang melindungi hak ulayat. 3. Mengembangkan gerakan “Sarjana Pulang Kampung” untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi kampung. 4. Mendorong transformasi ekonomi OAP dari ekonomi subsisten menuju usaha produktif dan bernilai tambah. 5. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat serta keterpaduan empat pilar pembangunan Papua. 6. Memperkuat pendekatan damai dan lokalisasi isu agar persoalan pada wilayah tertentu tidak menimbulkan generalisasi terhadap seluruh Papua	
4	Pertemuan Pokja Papua Produktif, Apkasindo dan Koperasi Onomi madani papua. 10 Agustus 2026	Terkait surat permohanan Koperasi Onomi Madani Papua tentang penerbitan surat pembebasan lahan diluar hutan lindung di Kab. Keerom.	Tgl, 10 Agusgus 2026 Pokja Papua Produktif, Apkasindo dan Kop. OMP, melakukan pertemuan dgn Kepalan Dinas BPN/ATR Kab. Keerom di ruang kerjanya	1. Waktu dan kesiapan utk turun bertemu masyarakat Kampung Bagia ttg kesiapan menerima PSR dan dilakukan pengukuran oleh BPN/ATR Kab. Keerom. 2. Persiapkan data Petani dan Lahan Petani yg akan dilakukan PSR.	

5	Audiensi pembahasan terkait berakhirnya Akreditasi BLUD RSUD Abepura pad abulan Mei 2027 maka direncakan untuk survei reakreditas pad bulan Desember 2026 dan permintaan vasilitas pemenuhan sarana alat kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia 11 Agustus 2026	Melaksanakan audiensi RSUD Abepura dengan BPP/BP3OKP untuk menyampaikan kondisi aktual rumah sakit, kesiapan menghadapi reakreditasi Desember 2026, serta kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi lintas pemerintah.	1. Kesiapan reakreditasi RSUD Abepura sekitar 67–70%, dengan kebutuhan dukungan sekitar Rp10 miliar untuk rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan menjelang Desember 2026. 2. Terdapat keterbatasan pembiayaan, dengan dukungan anggaran sekitar Rp19–19,9 miliar, sementara kebutuhan ideal operasional sekitar Rp60 miliar per tahun. 3. Diperlukan perhatian terhadap sarana, prasarana, dan alat kesehatan, termasuk ruang TBC tekanan negatif, ruang operasi, dan CT Scan. 4. Masih terdapat gap pembiayaan pelayanan BPJS terhadap sejumlah pelayanan yang tetap harus ditangani rumah sakit. 5. RSUD Abepura akan menyiapkan dokumen kebutuhan secara komprehensif sebagai dasar koordinasi lebih lanjut.	1. Mendorong pengamanan proses reakreditasi RSUD Abepura melalui pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan sarana prasarana. 2. Mendorong penguatan dukungan pembiayaan operasional dan pemenuhan alat kesehatan kritis. 3. Memfasilitasi pembahasan bersama BPJS dan pemerintah terkait untuk mencari alternatif penyelesaian gap pembiayaan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Papua. 4. BPP/BP3OKP menindaklanjuti dokumen kebutuhan RSUD Abepura melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, BPJS, dan pemangku kepentingan terkait.	
6	DPRK Jayapura_Pansus Otsus DPRK Jayapura_Koordinasi mengenai kebijakan, perencanaanm pengalokasia, pelaksanaan, serta Evaluasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS). 12 Agustus 2026	Pada 12 Agustus 2026, dilaksanakan rapat koordinasi BPP/BP3OKP dengan Pansus Otsus DPRK Jayapura untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus, khususnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Dana Otsus agar transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua.	1. Disepakati penguatan pengawasan Dana Otsus pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan memastikan keberpihakan kepada OAP. 2. Ditekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan dan partisipatif, termasuk keterlibatan masyarakat sejak tingkat kampung dan distrik. 3. Diperlukan keterbukaan dan keterlacakan data Dana Otsus dari sumber anggaran, program, lokasi, penerima manfaat OAP, keluaran, hasil, hingga dampak. 4. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pengawasan, termasuk validitas data OAP, pembayaran iuran JKN, kapasitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta keamanan pangan. 5. Diperlukan penguatan kebijakan afirmasi dan pemberdayaan pengusaha OAP sesuai Perda Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2024. 6. BPP/BP3OKP dan Pansus Otsus DPRK Jayapura berkomitmen memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Dana Otsus secara berkelanjutan	1. Memperkuat pelaksanaan Musrenbang Otsus dan memastikan usulan masyarakat dapat ditelusuri hingga menjadi program daerah. 2. Menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP serta memastikan penerima manfaat OAP ditetapkan sejak tahap perencanaan. 3. Memutakhirkan dan mengintegrasikan basis data OAP serta menyediakan data Dana Otsus yang dapat ditelusuri dan dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah daerah. 4. Memperkuat pengawasan bidang kesehatan melalui verifikasi pembayaran JKN, evaluasi kapasitas fasilitas rujukan, kebutuhan tenaga kesehatan, dan pengawasan keamanan pangan lintas sektor. 5. Memvalidasi data sekolah, guru, peserta didik, serta sarana prasarana sebagai dasar kebijakan dan penganggaran. 6. Menindaklanjuti Perda Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2024 melalui aturan pelaksana dan mekanisme verifikasi pengusaha OAP.	

				7. Menyelenggarakan penyampaian materi RIPPP, RAPPP, dan ketentuan pengelolaan Dana Otsus kepada DPRK Jayapura serta membangun koordinasi berkelanjutan antarlembaga.	
7	Mengikuti Zoom Lokakarya Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II TA 2026 dan Workshop Penyusunan RAP Awal Dana Otsus Papua TA 2027 melalui Aplikasi Interoperabilitas (Batch 2). 18 – 22 Agustus 2026	Mengikuti lokakarya untuk memperoleh pemahaman mengenai percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026, pengelolaan SiLPA, serta mekanisme penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus.	Mengikuti lokakarya untuk memperoleh pemahaman mengenai percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026, pengelolaan SiLPA, serta mekanisme penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus.	1. Mendorong pemerintah daerah untuk segera memenuhi dan melengkapi dokumen persyaratan salur Dana Otsus dan DTI Tahap II TA 2026 sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi antar-OPD, Bappeda/Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat dalam memastikan kesesuaian data realisasi, capaian keluaran, dan dokumen pendukung. 3. Mendorong pemanfaatan interoperabilitas SIPD-RI, SIPPP, dan SIKD Otsus secara optimal untuk mendukung penyusunan RAP Awal TA 2027 yang lebih akurat, sinkron, dan sesuai dengan prioritas pembangunan Papua.	
8	Rapat Koordinasi Program Sekolah Rakyat 20 Agustus 2026	Melaksanakan rapat koordinasi pada 20 Agustus 2026 bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan Program Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor, termasuk kendala pelaksanaan serta keterlibatan Subkontraktor OAP.	1. Realisasi fisik pembangunan Program Sekolah Rakyat per 20 Agustus 2026 mencapai 28,50% di Kota Jayapura, 21,75% di Kabupaten Biak Numfor, dan 12,40% di Kabupaten Sarmi. 2. Pelaksanaan pembangunan masih menghadapi kendala geografis, logistik dan transportasi, ketersediaan material lokal, serta kondisi cuaca. 3. Sebanyak 14 Subkontraktor OAP telah dilibatkan, terdiri atas 6 di Kota Jayapura, 5 di Biak Numfor, dan 3 di Sarmi.	1. Mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada lokasi yang menjadi titik peninjauan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden RI ke Jayapura. 2. Menyiapkan fact sheet dan maket visual sebagai bahan informasi perkembangan Program Sekolah Rakyat. 3. Mendorong penyelesaian pembayaran termin Subkontraktor OAP guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kondisi sosial di lapangan.	
9	Bappernas_Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus 2026. (Zoom) 24 Agustus 2026	Mengikuti rapat tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026 dan penyelarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025–2029.	Diperoleh informasi terkait status penyelarasan usulan daerah, penyelesaian Berita Acara, serta daerah yang masih memerlukan perbaikan dan pendampingan lanjutan	Mendorong pemerintah daerah yang belum selesai untuk segera melakukan perbaikan dan penyelesaian dokumen, serta BPP melakukan pemantauan tindak lanjut sesuai fungsi SHEK.	

10	Kunjungan Kemenlu (10514/DM/08/2026/61) Menghadiri dan mengikuti pertemuan dengan Delegasi Kementerian Luar Negeri dalam rangka pembahasan perkembangan pembangunan Papua serta penguatan peran Papua dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik pada senin 24 Agustus 2026, di Swiss-Belhotel Jayapura. 24 Agustus 2026	.Mengidentifikasi perkembangan dan tantangan pembangunan Papua serta membahas peluang penguatan peran Papua dalam kerja sama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.	Teridentifikasi isu strategis pembangunan Papua meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan dan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, ekonomi kreatif, serta pengembangan generasi muda. Selain itu, terpetakan potensi dan peluang kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik serta kebutuhan penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.	Memperkuat pembangunan SDM dan pendekatan pembangunan yang humanis dan berorientasi pada perdamaian, meningkatkan peran masyarakat asli Papua, serta mengembangkan potensi budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Mendorong kerja sama Papua dengan kawasan Pasifik di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, dan kepemudaan serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan.	
11	Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Implementasi Dana Otonomi Khusus Papua serta Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 27 Agustus 2026	1. Mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya dalam tata kelola, perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus. 2. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan koordinasi antarinstansi melalui interoperabilitas sistem SIKD, SIPD, dan SIP3. 3. Mengidentifikasi kendala kelembagaan, pengelolaan dana Otsus, serta ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar perencanaan pembangunan. 4. Mendorong penguatan tata kelola Otsus menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.	1. Teridentifikasi masih adanya kendala dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan dana Otsus di daerah. 2. Ditekankan pentingnya interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta penguncian tahapan perencanaan untuk meningkatkan sinkronisasi dan disiplin anggaran. 3. Diperlukan penguatan kelembagaan DPRP, MRP, dan BP3OKP serta peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan Otsus. 4. Ditekankan pentingnya data OAP yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 5. Disepakati perlunya peningkatan transparansi melalui rekening khusus dana Otsus, pelabelan sumber pendanaan, serta pengawasan berbasis kinerja.	1. Memperkuat tata kelola dan pengawasan dana Otsus melalui perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. 2. Memastikan interoperabilitas SIKD, SIPD, dan SIP3 serta ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari mekanisme penyaluran dana Otsus. 3. Menyediakan dan menggunakan data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program Otsus. 4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait. 5. Mempercepat harmonisasi regulasi turunan Otsus serta meningkatkan transparansi penggunaan dana melalui rekening khusus dan labeling sumber pendanaan.	 

12	Verifikasi dan Penyelarasan terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. 27 Agustus 2026	Melakukan verifikasi dan penyelarasan program kerja Pokja Papua Cerdas dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, termasuk indikator, target, dan pendanaan.	Program dan kegiatan Pokja Papua Cerdas telah diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua. Terdapat kesepahaman mengenai indikator dan target kinerja agar program lebih tepat sasaran serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.	Melanjutkan koordinasi antara Pokja Papua Cerdas dan BAPPERIDA Provinsi Papua untuk mengawal hasil verifikasi dan penyelarasan hingga tahap penganggaran dan penetapan dokumen akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.	
13	Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Kabupaten Jayapura bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 28 Agustus 2026	Memperkuat pemahaman dan kapasitas DPRK jalur pengangkatan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak, serta kewenangannya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, sekaligus membahas berbagai kendala kelembagaan, politik, dan pengawasan dana Otsus.	Terdapat penegasan bahwa DPRK jalur pengangkatan memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan anggota DPRK hasil pemilu. Rapat juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, termasuk keterbatasan akses informasi anggaran, dominasi politik, belum optimalnya sekretariat kelompok khusus, serta pengawasan dana Otsus. BPP menyatakan kesiapan menjadi jembatan koordinasi antara DPRK dan pemerintah pusat.	Memperkuat peran dan kedudukan DPRK jalur pengangkatan melalui penyempurnaan Tata Tertib, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan tenaga ahli, penguatan koordinasi dengan BPP dan Kemendagri, serta peningkatan transparansi dan pengawasan pengelolaan dana Otsus.	
14	Menerima Permohonan Pertemuan dengan Kelompok Pengusaha Orang Asli Papua. 31 Agustus 2026	Mendengarkan permohonan Menerima dan mendengarkan aspirasi kelompok pengusaha OAP terkait pemanfaatan dan pengelolaan anggaran Otsus.	Diperoleh aspirasi dan informasi dari kelompok pengusaha OAP terkait pemanfaatan anggaran Otsus serta kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.	Mendorong koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRK sesuai kewenangan masing-masing serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut aspirasi kelompok pengusaha OAP terkait pemanfaatan anggaran Otsus.	

KESIMPULAN KEGIATAN POKJA PAPUA PRODUKTIF AGUSTUS 2026

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Produktif BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua selama bulan Agustus 2026 menunjukkan adanya penguatan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. Kegiatan difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat dan OAP, percepatan Program Sawit Rakyat (PSR), penguatan tata kelola Dana Otsus, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Beberapa hal strategis yang menjadi perhatian meliputi percepatan PSR di Kabupaten Keerom melalui penguatan data petani dan lahan serta kesiapan kelembagaan koperasi; penguatan tata kelola dan pengawasan Dana Otsus; peningkatan kesiapan RSUD Abepura menghadapi reakreditasi; percepatan pembangunan Program Sekolah Rakyat dengan keterlibatan Subkontraktor OAP; serta penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat/pengusaha OAP.

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan perlunya sinkronisasi perencanaan, penganggaran, data OAP, dan pelaksanaan program agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua.

Secara keseluruhan, Pokja Papua Produktif merekomendasikan penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, percepatan penyelesaian kendala pelaksanaan program, pemutakhiran dan integrasi data, serta pemantauan berkelanjutan sesuai fungsi SHEK BPP/BP3OKP untuk memastikan program pembangunan Papua berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada OAP.

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

AGUSTUS 2026

KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN :

Pada Agustus 2026, BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjalankan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dalam mendukung pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan mencakup tata kelola Dana Otsus, penyelarasan program dengan RIPPP/RAPPP, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan OAP, isu perbatasan dan masyarakat Papua di PNG, pembangunan Sekolah Rakyat, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dari berbagai kegiatan tersebut, terlihat bahwa koordinasi lintas sektor, keterpaduan data, penyelarasan perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan program masih perlu terus diperkuat. BPP/BP3OKP memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah agar program yang dilaksanakan lebih selaras dengan kebutuhan dan kondisi Papua serta memberikan manfaat bagi OAP.

Tindak lanjut perlu difokuskan pada pengawalan hasil koordinasi, penyelarasan perencanaan dengan RIPPP/RAPPP, penguatan tata kelola Dana Otsus, pembaruan data OAP, serta peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut perlu disertai monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat Papua

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua selama bulan Agustus 2026 disampaikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) serta mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi Sekretariat Badan Pengarah Papua pada Sekretariat Wakil Presiden dan para pemangku kepentingan dalam menentukan langkah tindak lanjut dan memperkuat kerja sama dalam menangani berbagai isu pembangunan di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi OAP, permasalahan pertanahan, dan pelaksanaan Otonomi Khusus.

BPP/BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat adat agar hasil koordinasi dan rekomendasi yang telah disusun dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.